PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BUKU PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

SEMESTER I

TAHUN 2026

KABUPATEN PASER





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Alloh Azza Wa Jalla, yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua, sehingga penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Paser Semester I Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan ketentuan pasal 83Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukandan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kependtingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan", serta pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, Bupati/Walikota menyusun profil perkembangan kependudukan berskala kabupaten/kota.

Profil Perkembangan Kependudukan di Kabupaten Paser kali merupakan gambaran kondisi dan perkembangan kependudukan di Kabupaten Paser Tahun 2026 pada Semester I. Dari sini diharapkan dapat menyajikan data dan informasi kependudukan yang tepat, akurat dan mutakhir sehingga dapat dimanfaatkan untuk perumusan berbagai kebijakan pembangunan, rancangan program kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kependtingan pembangunan lainnya. Data pada profil perkembangan kependudukan ini diperoleh dari Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan menggunkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berbasis Data Kependudukan Bersih (DKB) dan data dari lintas sektor terkait lainnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran dan koreksi dari semua pihak sehingga dapat lebih menyempurnakan pada penyusunan mendatang.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Paser Semester I Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Alloh SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya untuk kita semua, aamiin yaa robbal'aalamiin.

Tana Paser, Agustus 2026

Kepala Dinas

MOHD. ISNAINI YANUARDI, S.Hut,. MM
Pembina Tingkat I/IV.a
NIP. 197001051998031010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN ……. 1

A Latar Belakang ……. 1

B Tujuan ……. 3

C Ruang Lingkup ……. 3

D Konsep dan Definisi …… 4

BAB II GAMBARAN UMUM …… 10

A Latar Belakang …… 10

B Sejarah Kepemimpinan …….. 11

C Geografis dan Batas Wilayah ……... 12

D Luas Wilayah dan Topografi …….. 13

E Potensi Daerah …… 16

BAB III DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 28
KABUPATEN PASER ……

A Visi dan Misi ……. 28

B Tugas Pokok Dan Fungsi ……..……. 29

C Struktur Organisasi …….. 30

D Sumber Daya Manusia ……... 31

BAB IV KUANTITAS PENDUDUK …….. 33

A Persebaran (Distribusi) Penduduk 33

B Komposisi Penduduk Menurut Karaktaristik Demografi 36

C Komposisi Penduduk Menurut Karaktaristik Sosial 43

BAB V KUALITAS PENDUDUK …….. 53

A Anak dan Perempuan ……. 53

B Keekonomian …… 54

C Tenaga Medis dan Non Medis …….. 56
D Cakupan Layanan Kependudukan …… 57

BAB VI MIGRASI PENDUDUK …… 61
A Migrasi ……... 61
B Pindah dan Datang …….. 64

BAB VII PENUTUP …… 65
A Kesimpulan ……... 65
B Referensi ……... 66

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data terbaru dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan laporan ke PBB, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Oleh karenanya Negara Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar. Angka menunjukkan ada 17.380 pulau per 2024, yang mencakup pulau besar seperti Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta ribuan pulau kecil lainnya. Sekaligus dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Jumlah penduduk yang besar tentu menjadi potensi untuk membangun bangsa. Perencanaan Pembangunan yang disusun oleh pemerintah tidak terlepas dari keberadaan penduduk. Maka isu kependudukan menjadi suatu hal sangat penting. Artinya isu kependudukan adalah isu strategis dan bersifat lintas sektor. Oleh karena itu, pengintegrasian data penduduk ke dalam seluruh aspek perencanaan pembangunan menjadi pekerjaan besar yang harus diwujudkan. Karena membangun harus berbasis data kependudukan. Sebab ada istilah *Membangun Itu Mahal, Tapi Membangun Tanpa Data Itu Lebih Mahal* atau dengan kata lain *Membangun Tanpa Data Ibarat Berjalan Tanpa Tujuan*.

Data kependudukan memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan, penentuan kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Hal ini bukan hanya bagi pemerintah tetapi termasuk dunia usaha. Oleh sebab itu penyusunan profil kependudukan yang di dalammya memuat data perkembangan kependudukan bisa menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan. Karenanya tanpa mendasarkan pada data-data penduduk mustahil sebuah kebijakan pembangunan akan tepat sasaran.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan pemerintahan yang konkuren dan bersifat wajib. Meskipun demikian tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar dan kewajiban pemerintah kabupaten dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Selain itu, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan amanat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 bahwa Penyajian Data Berskala Kabupaten dalam bentuk Buku Profil Perkembangan Kependudukan berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini bermaksud menjawab kebutuhan informasi tentang kependudukan yang tersajikan secara berkelanjutan. Karena dalam penyusunan ini terdapat gambaran lengkap terkait kondisi dan aspek-aspek yang terkandung dalam *database* kependudukan. Selain itu tersisip di dalamnya data-data dari lintas sektor. Kemudian sisi lain dari penyusunan profil kependudukan ini adalah wujud nyata dari pemanfaatan data kependudukan yang tersebar di berbagai instansi.

Isi amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa bahan utama adalah data kependudukan hasil layanan registrasi penduduk melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil selama satu tahun dan telah dikonsolidasi oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri. Data kependudukan ini telah terintegrasi dengan data perekaman KTP-el sehingga validitas ketunggalan data kependudukan dapat

dipertanggungjawabkan. Sementara itu elemen data hasil registrasi kependudukan yang dipergunakan dalam penyusunan profil kependudukan meliputi data yang ada hubungannya dengan variabel kuantitas dan kualitas penduduk serta variabel mobilitas penduduk.

Adapun kerangka pikir dalam penyusunan profil kependudukan ini mencakup beberapa hal, di antaranya adalah :

1. Menyajikan perkembangan profil kependudukan dari aspek kuantitatif sehingga mampu mencerminkan keadaan sebenarnya.
2. Menampilkan data kualitatif dengan mengidentifikasi kelompok atau segmen kependudukan yang membutuhkan perhatian khusus dan aspek-aspek yang mempengaruhinya.
3. Penyiapan sebagai bahan koordinasi, kerja sama dan kegiatan lainnya yang sinergi dengan kegiatan kepemerintahan dan kegiatan administratif yang mendukung kegiatan dimaksud.
4. Mendorong percepatan menuju terwujudnya *database* penduduk dan analisa untuk pembangunan daerah/kabupaten.

B. Tujuan

Menyajikan profil perkembangan kependudukan dengan memberikan gambaran tentang kondisi kependudukan Kabupaten Paser Semester I Tahun 2026 sebagai salah satu informasi untuk dijadikan bahan perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

C. Ruang Lingkup

1. Kuantitas penduduk, meliputi komposisi dan persebaran penduduk;
2. Kualitas penduduk meliputi tingkat kesehatan, pendidikan, keekonomian dan sosial;
3. Mobilitas penduduk meliputi mobilitas permanen, mobilitas non permanen dan urbanisasi;
4. Kepemilikan dokumen kependudukan.

D. Konsep dan Definisi

1. **Administrasi Kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hal lainnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013);
2. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
4. **Data Kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. **Perkembangan Kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.
6. **Profil Perkembangan Kependudukan** adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010)
7. **Warga Negara Indonesia** yang selanjutnya disingkat menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. **Dokumen Kependudukan** adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan

hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

9. **Nomor Induk Kependudukan**, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
10. **Kartu Keluarga**, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
11. **Kartu Tanda Penduduk Elektronik**, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
12. **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**, selanjutnya disingkat **SIAK**, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
13. **Kuantitas Penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal. (Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009)
14. **Kualitas Penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
15. **Mobilitas Penduduk** adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi daerah tingkat II. (Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009).

16. **Persebaran Penduduk** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan. (Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009).
17. **Peristiwa Kependudukan** adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013)
18. **Peristiwa Penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013).
19. **Kematian (*mortalitas*)** menurut WHO adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. (Badan Pusat Statistik).
20. **Rasio Jenis Kelamin** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin antara banyak penduduk laki-laki dan perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu.
21. **Mobilitas Penduduk Permanen (*migrasi*)** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional);
22. **Mobilitas Penduduk Non Permanen (*circulation/sirkuler*)** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif;
23. **Penduduk Musiman** merupakan salah satu jenis mobilitas penduduk non permanen yang bekerja tidak pada daerah

domisilinya dan menetap dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun dan dilakukan secara berulang;

24. **Mobilitas Penduduk Pulang Pergi (*Comutting*)** adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama;
25. **Migrasi Kembali (*Return Migration*)** adalah banyaknya penduduk yang pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal didaerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal di daerah yang berbeda;
26. **Migrasi Semasa Hidup (*Life Time Migration*)** adalah bentuk migrasi dimana pada waktu diadakan pendataan tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat kelahirannya;
27. **Migrasi Risen (*Recent Migration*)** adalah bentuk migrasi melewati batas wilayah administrasi (desa/kecamatan/kabupaten/provinsi) dimana pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal didaerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu;
28. **Transmigrasi** adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap diwilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi pemukiman transmigrasi;
29. **Urbanisasi** adalah suatu proses bertambahnya konsentrasi penduduk di perkotaan dan atau proses perubahan pedesaan menjadi perkotaan, baik secara fisik maupun ukuran-ukuran spasial dan/atau bertambahnya fasilitas perkotaan, serta lembaga-lembaga sosial maupun perilaku masyarakatnya;
30. **Penduduk Usia Kerja** adalah penduduk yang berumur 15 sampai 64 tahun;
31. **Angka Partisipasi Angkatan Kerja** adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja;

32. **Pengangguran** adalah orang yang termasuk angkatan kerja namun pada saat pendataan/survey atau sensus tidak bekerja dan atau sedang mencari kerja;
33. **Angka Pengangguran** adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja sesuai data;
34. **Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun kebawah dan penduduk berusia 64 tahun keatas;
35. **Lahir Hidup** adalah angka atau data kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot;
36. **Lahir Mati** adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan;
37. **Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)** adalah rata-rata banyaknya anak yang akan dimiliki seorang wanita pada masa reproduksinya jika ia mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung;
38. **Angka Kematian Bayi Baru Lahir** adalah banyaknya kematian baru lahir, usia kurang dari satu bulan (0–28 hari) pada suatu periode per 1000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
39. **Angka Kematian Bayi Lepas Baru Lahir** adalah banyaknya kematian bayi lepas baru lahir (usia 1–11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
40. **Angka Kematian Bayi (IMR)** adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9–11 bulan) pada suatu periode per 1000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama

41. **Angka Kematian Ibu (IMR)** adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya.
42. **Angka Kematian Kasar** adalah banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk;
43. **Penduduk Melek Huruf** adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang telah bebas dari tiga buta, yaitu buta aksara, buta latin, buta angka, buta Bahasa Indonesia dan buta pengalaman dasar;
44. **Buta Huruf** adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang belum bebas dari tiga buta, yaitu buta aksara, buta latin, dan buta angka, serta buta Bahasa Indonesia dan buta pengalaman dasar
45. **Angka Partisipasi Total** adalah proporsi penduduk bersekolah menurut golongan umur sekolah yaitu umur 7–12, 13–15, 16–18, dan 19–24 tahun;
46. **Angka Partisipasi Murni (APM)** adalah presentase jumlah peserta didik SD usia 7–12 tahun, jumlah peserta didik SLTP usia 13–15 tahun, jumlah peserta didik SLTA usia 16–18 tahun dan jumlah peserta didik PTN/PTS usia 19–24 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia dari masing-masing jenjang pendidikan;
47. **Angka Partisipasi Kasar (APK)** adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

BAB II
GAMBARAN UMUM

A. Latar Belakang

Kabupaten Paser (Kabupaten Pasir secara resmi berganti nama menjadi **Kabupaten Paser** berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007), dalam dunia administrasi kependudukan memiliki kode 6401, merupakan wilayah paling selatan di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Paser terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tertanggal 29 Desember 1959 tentang Pembentukan Wilayah Swatantra Pasir di bawah Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi pada awal berdirinya Kabupaten Paser bernama Pasir hanyalah merupakan daerah Swatantra atau dahulu dikenal daerah Kawedanan. Kemudian Pada tanggal 3 Agustus 1961 Daerah Swatantra Kabupaten Pasir dimasukkan ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 1961 dilaksanakan serah terima oleh Gubernur Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan, H. Maksid kepada Gubernur Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Timur, A.P.T. Pranoto di Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

Gambar 2.1. Peta Kabupaten Paser



Peta Kabupaten Paser ini tergambar setelah terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni ada 4 (empat) kecamatan membentuk 1 (satu) kabupaten. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tertanggal 10 April 2002, resmi sebagai kabupaten baru. Selanjutnya Ibu kota kabupaten ini juga

mengalami penyesuaian nama dari Tanah Grogot menjadi **Tana Paser** melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013

B. Sejarah Kepemimpinan

Sejarah kepemimpinan di Pemerintahan Kabupaten Paser bermacam-macam sebutannya. Pada awal mula berdiri disebut Penguasa Daerah pertama yang dijabat oleh Muhammad Fadlan, kemudian Soebrata Yoeda Soebrata pada tahun 1961 sebagai Pj. Bupati KDH Tingkat II Paser. Kemudian selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Muhammad Djamdjam Tahun 1961 – 1962 menjabat Bupati KDH tingkat II Pasir;
2. Drs. Yahmo Hadisoekrisno pada tahun 1962–1965 Bupati KDH Tingkat II Pasir.
3. Soerono pada tahun 1965 menjadi Penjabat bupati.
4. M. Saleh Nafsi, S.H, tahun 1965-1979 Bupati KDH Tingkat II Pasir.
5. Drs. Badarani Abbas menjabat Bupati KDH tingkat II Pasir Tahun 1979-1984;
6. Ir. Sulaiman Ismail pada tahun 1984-1988 sebagai Bupati KDH Tingkat II Pasir;
7. Drs. Syahrul Effendi Busra pada tahun 1988–1989 menjabat Pj Bupati KDH Tingkat II Pasir.
8. Drs. Ahmad Ramli pada tahun 1989–1999 menjabat sebagai Bupati KDH Tingkat II Pasir selama dua periode;
9. Drs. Arifin Saidi pada tahun 1999 menjabat sebagai Penjabat Bupati;
10. Drs. Yusriansyah Syarkawi pada tahun 1999–2004 menjabat Bupati Pasir;
11. H. Adi Buhari, S.E, tahun 2004–2005 menjabat Pj Bupati Pasir;
12. H. M. Ridwan Suwidi & H. M. Hatta Garit, MM. pada tahun 2005–2010 Terpilih menjadi bupati dan wakil bupati secara demokratis melalui Pilkada 2005;

13. H. M. Ridwan Suwidi & H. M. Mardikansyah, SH, M.Ap pada tahun 2010-2015 Bupati dan wakil bupati Paser;
14. Dr. Ir H Ibrahim MP menjabat Pj Bupati pada 9 Oktober 2015 – 16 Februari 2016;
15. Tahun 2015 Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.Si, dan H.M. Mardikansyah, MAP terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Paser, yang kemudian H.M. Mardikansyah wafat, digantikan oleh H. Kaharuddin, SE hingga masa jabatan berakhir.
16. Selanjutnya dr. Fahmi Fadli dan Hj. Syarifah Masitah Assegaf, SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2020-2024.
17. H.M. Syirajudin, S.H., M.T menjabat sebagai Pjs. Bupati Paser selama 58 hari, terhitung dari pelantikannya pada 25 September 2024 hingga berakhirnya masa cuti kampanye bupati petahana pada 23 November 2024**.**
18. Periode 2024-2029 terpilih Bupati dan Wakil Bupati, dr. Fahmi Fadli dan H. Ikhwan Antasari, S.Sos.

C. Geografis dan Batas Wilayah

1. Geografis

   Kabupaten Paser merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak paling selatan, tepatnya pada posisi 00 45'18,37" - 20 27'20,82" LS dan 1150 36'14,5" -1660 57'35,03" BT. Kabupaten Paser terletak pada ketinggian yang berkisar antara 0-500 meter di atas permukaan laut. Adapun gunung yang tertinggi mencapai 1.380 mdpl yang terletak diperbatasan dengan provinsi tetangga.

2. Batas Wilayah

   Kabupaten Paser berbatasan langsung dengan kabupaten pada provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagaimana berikut :

   a. Pada sisi bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Barat.

b. Sisi sebelah timur adalah Selat Makassar
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan
d. Sebelah barat dengan Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan) dan Kabupaten Barito Utara (Provinsi Kalimantan Tengah)

D. Luas Wilayah dan Topografi

1. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Paser saat ini adalah 11.603,94 km², terdiri dari 10 kecamatan dengan 139 desa dan 5 kelurahan. Jumlah penduduk pada tahun 2022 mencapai 296.582 jiwa atau memiliki kepadatan penduduk 25,56 jiwa/km². Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Long Kali, Paser, dengan luas 2.385,39 km², termasuk di dalamnya luas daerah lautan yang mencapai 20,56 persen dari luas wilayah Kabupaten Paser secara keseluruhan, sedangkan kecamatan luas terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot, seluas 335,58 km² atau 2,89 persen. Sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.1. Data Luas Per Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH (KM2)	%
		DARAT	LAUT		
1	BATU SOPANG	1,111.38	0.00	1,111.38	9.58
2	TANJUNG HARAPAN	480.40	233.65	714.05	6.15
3	PASER BELENGKONG	836.62	153.49	990.11	8.53
4	TANAH GROGOT	326.95	8.63	335.58	2.89
5	KUARO	596.76	150.54	747.30	6.44
6	LONG IKIS	1,138.37	65.85	1,204.22	10.38
7	MUARA KOMAM	1,753.40	0.00	1,753.40	15.11
8	LONG KALI	2,250.44	134.95	2,385.39	20.56
9	BATU ENGAU	1,501.61	5.65	1,507.26	12.99
10	MUARA SAMU	855.25	0.00	855.25	7.37
	JUMLAH	10,851.18	752.76	11,603.94	100.00

Sumber Data : Dinas Pertanahan dan Permukiman Kab. Paser

Dari segi konstelasi regional, Kabupaten Paser berada di sebelah Selatan Provinsi Kalimantan Timur. Posisinya dilintasi oleh jalan arteri primer (jalan negara/nasional) yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Pada bagian timur Kabupaten Paser terdapat jalur laut yakni selat Makassar, dimasa kini dan yang akan datang telah menjadi jalur pelayaran internasional. Pelabuhan laut utama di Kabupaten Paser, yaitu Pelabuhan Teluk Adang (Pondong) terletak 12 km ke arah utara ibu kota Kabupaten (Kota Tana Paser), sedangkan Kota Tana Paser berjarak lebih kurang dari 145 km dari Balikpapan atau 260 km dari Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda.

2. Topografi

Wilayah Kabupaten Paser apabila dilihat dari sisi topografi atau secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) wilayah, yaitu:

a. Bagian timur, merupakan daratan rendah, landai hingga bergelombang. Daerah ini memanjang dari utara ke selatan dengan lebih melebar di bagian selatan yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai. Jalan Negara Penajam – Kandeman - Kuaro dan Kuaro - Batu Aji sebagai batas topografi.
b. Bagian barat, merupakan daerah bergelombang hingga berbukit dan bergunung sampai ke perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, pada wilayah ini terdapat beberapa puncak gunung, yaitu:
    1) Gunung Sarumpaka (1.380 mdpl)
    2) Gunung Lumut (1.233 mdpl)
    3) Gunung Narujan atau Gunung Rambutan
    4) Gunung Halat

    Selain keempat gunung diatas, di Kabupaten Paser terdapat 3 (tiga) sungai besar yang pada jamannya merupakan urat nadi perekonomian dan kehidupan masyarakat Paser. Ketiga sungai dimaksud adalah Sungai Kandilo sepanjang 221 km, kemudian

Sungai Telake dengan panjang 191 km, dan Sungai Apar besar dan kecil.

Kemiringan lahan (prosentase lereng) menjadi faktor ini sangat menentukan besar kecilnya kerusakan tanah oleh erosi. Lereng didefinisikan sebagai hasil beda ketinggian antara 2 (dua) tempat (kedudukan) dengan jarak datanya, dan dinyatakan dalam persen. Kemiringan lereng berkaitan dengan tingkat kestabilan lereng akibat pengupasan lahan dan tatanan keseimbangan neraca air akibat dari kenaikan debit limpasan air permukaan. Dampak negatif akan berkurang apabila neraca air dapat dipulihkan kepada keadaan semula dengan memasukkan kelebihan run off ke tanah melalui rekayasa teknik seperti sumur resapan dan kolam resapan. Berdasarkan peta kelerengan, wilayah Kabupaten Paser memiliki lima tipe kemiringan yaitu kemiringan 0-8%, 8-15% dan 15-25%, 25-40%, dan >40%. kriteria kelerengan lahan dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.2. Data Deskripsi Tanah

No.	Kelas	Lereng (%)	Deskripsi	Luas (Km^2)	%	Kecamatan
1	I	00 - 08	Datar	2.028,51	17,48	Tanjung Harapan, Pasir Belengkong, Tanah Grogot, dan Kuaro
2	II	Aug-15	Landai	1.653,96	14,25	Batu Engau, dan Long Ikis
3	II	15 - 25	Agak Curam	2.695,41	23,23	Long Kali, Muara Samu, dan Muara Komam
4	IV	25 - 40	Curam	63,33	0,55	Long Kali, dan Long Ikis
5	V	> 40	Sangat Curam	5.162,72	44,49	Batu Sopang, Muara Komam, Muara Samu, dan Long Kali.
Jumlah				11.603,94	100	

Sumber Data: SK Mentan No. 837/KPTS/UM /11/1980 dan N0.683/KPTS/UM/8/1981

Namun menilik keterangan diatas tentu sudah mengalami banyak perubahan, yang dikarenakan pemanfaatan lahan sebagai lahan perkebunan, lahan pertambangan, lahan pemukiman dan sebagainya.

E. Potensi Daerah

1. Pendidikan

Majunya pendidikan di suatu wilayah barangkali dapat dilihat dari proporsi jumlah penduduk sesuai umur dengan banyaknya lembaga pendidikan yang tersedia. Kabupaten Paser dengan jumlah penduduk sebanyak 265.354 dengan data terinci sesuai umur dan jenis pendidikan dibahas dihalaman lain dari buku ini. Ketersediaan lembaga pendidikan sangat menunjang sumber daya masyarakat (SDM) untuk memberikan sumbangsih dalam indeks pembangunan manusia (IPM).

Secara terinci Nampak dalam tabel berikut ini.

a. Pendidikan Usia Dini

Tabel 2.3. Data Jumlah Lembaga Pendidikan Usia Dini

No	KECAMATAN	TK/RA			KB			TPA			SPS			TOTAL
		N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	
1	BATU SOPANG	1	13	14	0	3	3	0	0	0	0	1	1	18
2	TJ. HARAPAN	1	0	1	0	4	4	0	0	0	0	0	0	5
3	PASER BELENGKONG	3	16	19	1	6	7	0	0	0	0	1	1	27
4	TANAH GROGOT	2	34	36	0	23	23	0	2	2	0	3	3	64
5	KUARO	1	19	20	0	9	9	0	0	0	0	0	0	29
6	LONG IKIS	2	31	33	0	17	17	0	0	0	0	0	0	50
7	MUARA KOMAM	2	7	9	0	10	10	0	0	0	0	0	0	19
8	LONG KALI	1	15	16	0	12	12	0	0	0	0	0	0	28
9	BATU ENGAU	1	6	7	0	10	10	0	0	0	0	0	0	17
10	MUARA SAMU	0	1	1	0	4	4	0	0	0	0	1	1	6
	JUMLAH	14	142	156	1	98	99	0	2	2	0	6	6	263

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Paser

Pada tabel diatas beberapa lembaga pendidikan di Kabupaten Paser tersedia sejak awal mula berdiri kabupaten ini, baik formal dan non formal jumlahnya selalu mengalami perubahan. Hal ini tentu mengikuti perkembangan dan perubahan jaman. Baik tentang pembangunan SDM maupun hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan.

Dari table 2.4 diatas dapat diterangkan lebih lanjut bahwa sarana pendidikan usia dini ini tersebar dan berdiri hampir seluruh desa. Hal ini juga menunjukkan kesadaran yang cukup tinggi dari masyarakat untuk mengikuti proses pendidikan dan belajar mengajar sejak dini bagi anak-anak mereka. Selanjutnya akan disampaikan tentang beberapa singkatan lembaga pendidikan diatas

1) TK/RA : Taman kanak-kanak/Raudhatul Athfal
2) KB : Kelompok Bermain
3) TPA : Taman Pendidikan Al Qur'an
4) SPS : Satuan Paud Sejenis

Tambahan sebagai catatan adalah hampir semua lembaga pendidikan usia dini ini merupakan jalur pendidikan non formal atau swadaya masyarakat. Sedangkan tenaga pengajar kebanyakan merekrut dari lingkungan desa itu sendiri yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang dibutuhkan. Hanya ada beberapa taman kanak-kanak negeri yang pengelolaannya berada dibawah pemerintah daerah dengan tenaga pengajar banyak dari unsur PNS/ASN. Meskipun demikian semangat membangun bangsa sejak dini melalui jalur pendidikan tetap berjalan sebagaimana adanya.

b. Pendidikan Dasar, Menengah Pertama & Menengah Atas

Sebagai lanjutan dari dunia pendidikan dini adalah pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pendidikan dasar disini disebut sekolah dasar (SD). Di Kabupaten Paser

ini sekolah dasar telah berdiri di seluruh desa dan kelurahan. Bahkan dalam 1 (satu) desa terdapat 2 (dua) atau 3 (tiga) karena kebutuhan. Sementara SLTP dan SLTA telah berdiri semua kecamatan dengan jumlah yang sangat memadai. Disamping SD, SLTP dan SLTA negeri terdapat pula swasta, yang dikelola oleh yayasan dan organisasi lainnya.

Tabel dibawah ini menunjukkan SD, SLTP dan SLTA baik negeri maupun swasta. Untuk mengetahui data SD, SLTP dan SLTA negeri dan swasta dapat dilihat dari kode dalam tabel N dan S, dimana N = Negeri dan S = Swasta.

Tabel 2.4. Data Jumlah SD,SLTP hingga SLTA Sederajat

No	KECAMATAN	SD Sederajat			SMP Sederajat			SMA Sederajat			SMK			TOTAL
		N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	
1	BATU SOPANG	13	3	16	4	1	5	1	1	2	0	0	0	23
2	TANJUNG HARAPAN	7	0	7	6	0	6	1	1	2	0	0	0	15
3	PASER BELENGKONG	25	3	28	8	2	10	1	2	3	0	0	0	41
4	TANAH GROGOT	35	7	42	13	11	24	4	6	10	4	3	7	83
5	KUARO	26	3	29	7	2	9	1	2	3	0	1	1	42
6	LONG IKIS	38	4	42	9	2	11	2	1	3	0	2	2	58
7	MUARA KOMAM	19	0	19	5	0	5	1	1	2	0	1	1	27
8	LONG KALI	30	4	34	8	6	14	1	1	2	0	2	2	52
9	BATU ENGAU	13	0	13	8	0	8	2	0	2	0	0	0	23
10	MUARA SAMU	9	0	9	2	0	2	1	1	2	0	0	0	13
	JUMLAH	215	24	239	70	24	94	15	16	31	4	9	13	377

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Paser

c. Perguruan Tinggi

Dalam rangka penyediaan tenaga kerja dengan skill diatas rata-rata Paser telah mengembangkan pendidikan tinggi. Hal ini tentu bertujuan memberikan fasilitas pendidikan tinggi yang dekat, mudah dan terjangkau. Terlebih untuk menampung lulusan SLTA menuju jenjang pendidikan tinggi di Kabupaten Paser telah tersedia Perguruan Tinggi Swasta dan Negeri, dengan disiplin ilmu pertanian, ekonomi, tarbiyah

dan teknologi khususnya permesinan. Perguruan tinggi tersebut antara lain :

1) Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur di Kab. Paser
2) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE “WIDYA PRAJA”)
3) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT “IBNU RUSYD”)
4) Universitas Terbuka

2. Ketenagakerjaan

Data ketenagakerjaan dewasa ini semakin diperlukan terutama untuk evaluasi dan perencanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta produktifitas tenaga kerja. Sangat masuk akal jika analisis mengenai kualitas sumber daya manusia biasanya menempatkan faktor ketenagakerjaan sebagai salah satu dimensi yang vital. Indikator ketenagakerjaan dapat memberikan gambaran tentang daya serap ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk dan produktivitas tenaga kerja. Apabila perekonomian tidak dapat menyerap pertumbuhan tenaga kerja yang ada, maka sudah barang tentu akan terjadi peningkatan pengangguran yang selanjutnya dapat mengakibatkan timbulnya masalah-masalah sosial. Selain itu indikator ketenagakerjaan juga dapat menggambarkan tingkat produktivitas tenaga kerja, yang berguna bagi investor untuk strategi investasi. Sementara bagi pemerintah dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan konsep dasar angkatan kerja penduduk dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) dan penduduk bukan usia kerja (kurang dari 15 tahun). Penduduk 15 tahun yang selanjutnya disebut sebagai Penduduk Usia Kerja (PUK) dapat dikategorikan ke dalam

angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan Kerja meliputi penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan, sedangkan yang termasuk Bukan Angkatan Kerja terdiri atas penduduk sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama biasanya dipakai sebagai salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja, disamping itu juga digunakan untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah. Jika dicermati dari penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor yang ada. Mayoritas penduduk di Kabupaten Paser bekerja di sektor pertanian/perkebunan, kemudian disusul sektor pertambangan dan penggalian, sektor-sektor jasa dan sisanya tersebar di berbagai sektor seperti di sektor perdaganan, industri, konstruksi, angkutan dan komunikasi serta lainnya (listrik, gas dan air minum serta keuangan). Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan pekerja adalah status pekerjaan bagi penduduk yang bekerja.

3. Kegiatan Ekspor

Hampir di setiap daerah memiliki komoditas unggulan untuk ekspor. Dan sebagian diantaranya sudah berhasil menguasai pasar ekspor mancanegara. Di Kabupaten Paser ada 4 (empat) komoditi ekspor yang selama ini menjadi penopang pembangunan ekonomi daerah yaitu karet, sawit (perkebunan) udang dan ikan (perikanan). Ke-4 potensi non migas tersebut yang tersebar di 10 kecamatan di kabupaten Paser yakni Kecamatan Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Batu Sopang, Muara Samu, Muara Komam, Pasir Belengkong, Batu Engau, Tanjung Harapan dan Tanah Grogot.

Melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser menyelenggarakan

pelatihan ekspor, sosialisasi, dan akselerasi UMKM Paser menuju Pasar Global. Adanya peningkatan jumlah produksi harus dibarengi peningkatan kualitas produk dari level nasional hingga menembus pasar global sangat mungkin dilakukan, mengingat Paser memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

4. Pariwisata

Selama tahun 2025 geliat dunia pariwisata di Kabupaten Paser menunjukkan peningkatan signifikan. Dunia wisata di Paser tidak hanya dipenuhi wisata alam. Dalam perkembangannya sudah banyak terdapat wisata lainnya seperti wisata religi, wisata kuliner dan wisata edukasi. Wisata alam yang menggoda ada goa, riam, air panas dan air terjun, sementara wisata edukasi (sejarah) ada keraton, makam raja-raja dan sebagainya.

Diantara sekian banyak lokasi wisata ini dikelola oleh pemerintah daerah, namun ada beberapa yang dikelola oleh masyarakat setempat dengan cara swakelola semacam Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Bahkan pengembangannya pun menggunakan dana hasil pendapatan tiket masuk, perparkiran, dan sebagainya. Termasuk kelengkapan fasilitas wisata edukasi maupun permainan hiburan semata. Berikut lokasi wisata yang ada di Kabupaten Paser. Dari sekian banyak lokasi wisata di Kabupaten Paser, ada beberapa yang tersusun dalam buku ini. Diantara tempat-tempat wisata itu antara lain :

a. Museum “Sadurengas” dan Komplek Makam Raja Kesultanan Paser



Museum Sadurangas merupakan eks istana kesultanan Paser. Bangunan ini berbentuk rumah panggung dengan ciri khas ukiran-ukiran yang bermotif sulur-suluran dan kaligrafi huruf arab. Berbagai koleksi benda-benda kuno dapat kita lihat ditempat ini, diantaranya: Al-Qur'an tua bertulis tangan, Tempayang guci kuno peninggalan Dinasti Yuan, alat-alat rumah tangga, alat-alat kesenian dan pakaian Sultan Paser. Di sisi lain (bagian belakang museum) ini terdapat pula kerangka ikan paus bongkok dengan panjang sekitar 15 meter yang ditemukan warga Desa Selengot Kecamatan Tanjung Harapan.



Disamping museum berdiri sebuah masjid tua pertama di Paser Belengkong dengan nama "Nurul Ibadah". Kedua bangunan peninggalan sejarah termasuk benda cagar budaya. Museum Sadurengas.

Sekitar 1 kilometer sebelah selatan Museum Sadurengas terdapat Makam Raja-Raja Paser. Di dalam kompleks makam Raja Paser ini dapat ditemukan makam raja-raja dari Kerajaan Sadurengas. Disekitar kompleks pemakaman juga terdapat sebuah batu yang oleh masyarakat setempat disebut "Batu Kilan". Batu Kilan ini sering dijadikan media oleh para pengunjung untuk mengetahui nasibnya. Konon, apabila sebatang kayu/lidi dengan ukuran sekilan



(kilan orang yang meniatkan) yang ditancapkan diatas batu ini mengalami penambahan panjang maka apa yang diniatkan orang tersebut akan terkabul tetapi apabila kayu/lidi itu berubah menjadi lebih pendek dari ukuran semula maka apa yang diniatkan orang itu tidak akan terkabul.

Apabila ingin mengunjungi Museum Sadurengas berada di Desa Pasir Belengkong, Kecamatan Paser Belengkong berjarak kurang lebih 7 (tujuh) kilometer dari Ibukota Kabupaten Paser, Tanah Grogot. Banyak pilihan transportasi untuk menuju tempat dimaksud seperti taxi umum, ojek online/lokal dan taxi carter.

b. Kemilau Laut Pondong



Ini merupakan tempat yang cukup aman dan nyaman untuk sekedar melepas penat setelah bekerja atau istirahat sejenak sembari makan bercengkerama bersama keluarga sambil menikmati udara di sebuah desa yang terletak dibibir pantai. Desa ini merupakan bagian dari Teluk Adang di Kabupaten Paser. Posisi berada di Kecamatan Kuaro meskipun lebih dekat jangkauan darat ke Tanah Grogot. Hal ini akibat pembagian wilayah pada saat masih menggunakan jalur sungai sebagai sarana transportasi di Kabupaten Paser. Di Desa ini telah berdiri megah pelabuhan dibawah Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Tana Paser. Sebagai penyangga IKN pelabuhan Pondong sedang

berbenah seperti penmbangunan dermaga, terminal peti kemas, terminal penumpang dan sebagainya. Sedangkan posisi “Kemilau Laut Pondong” terletak disebelah timur dari pelabuhan ini. Maka pengunjung dapat melihat lalu lalangnya kapal barang, tugboat batu bara dan kapal angkutan CPO. Apabila akan berkunjung ke sini dapat menghubungi pihak perangkat desa maupun lokal guide.

c. Wahana Wisata Tahura Lati

Wahana wisata Taman Hutan Raya (Tahura) Lati Petangis memiliki berbagai fasilitas seperti jalur jogging, dermaga warna, taman bermain, jembatan Gentung Dayo, pondok seluang, danau untuk memancing, menara pantau, gazebo, serta anjungan. Tahura juga memiliki berbagai jenis tanaman hutan seperti sengon, trembesi, dan mahoni, serta tempat penyemaian dan pembibitan buah-buahan.

Taman Hutan Raya (Tahura) Lati Petangis lebih tepatnya apabila digunakan sebagai wisata alam, sarana konservasi, dan sarana edukasi flora (tumbuhan) serta fauna (satwa).

Gambar 2.10
Jembatan Tahura



Pada objek wisata ini terdapat beberapa jenis burung yang jarang ditemukan di daerah lin. Seperti Kang Kareng Perut Putih (Burung Rangkong).

Tahura Lati Petangis adalah kawasan hutan yang merupakan bekas areal konsesi pertambangan PT. BHP Kendilo Coal yang berakhir operasinya pada tahun 2002. Kemudian melalui usulan Bupati Paser melalui surat No.540/009/Ek-Prod.III/2004 tanggal 30 Desember 2004 mengusulkan kepada Menteri Kehutanan agar sebagian areal pinjam pakai di Blok Petangis tersebut dijadikan Taman

Wisata Alam (TWA). Menindaklanjuti hal-hal tersebut di atas, pada tanggal 15 Maret 2005 Kepala BAPLAN Kehutanan membentuk Tim Evaluasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang bertugas melakukan inventarisasi data dan pengecekan lapangan untuk mengevaluasi areal pinjam pakai kawasan hutan di Blok Petangis dan mengkaji rencana pemanfaatan areal dimaksud.



Selanjutnya Gubernur Kaltim kepada Menteri Kehutanan melalui surat No.522.21/7384/Ek tanggal 7 September 2005 menyampaikan dukungan terhadap rekomendasi Pemerintah Kabupaten Paser yang berencana untuk mengelola areal bekas tambang PT. BHP KCI tersebut menjadi Tahura Lati Petangis. Akhirnya pada tanggal 04 Maret 2013 terbitlah Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.141/Menhut-II/2013, tentang Penunjukan Areal Penggunaan lain menjadi Kawasan Hutan dengan fungsi Taman Hutan Raya Lati-Petangis seluas ± 3.964 Ha yang terletak di Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah melalui proses yang panjang akhirnya Tahura Lati-Petangis telah ditetapkan sesuai SK.4335/MenLHK-PKTL/KUH/2015 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Lati-Petangis seluas 3.445,37 ha di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Maka sejak saat itulah menjadi kawasan wisata alam dengan pemandangan indah perpaduan antara gunung, bukit, lembah dan danau. Bagi mancing mania disediakan tempat-tempat khusus untuk melakukan aktivitasnya.

d. Pantai Pasir Mayang



Pantai Pasir Mayang yang terletak di Desa Pasir Mayang Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Pantai yang eksotis dengan pasir yang putih dengan pesona alam Kalimantan yang memanjakan mata. Tempat ini tidak terlalu jauh jika ditempuh dari Kecamatan Tanah Grogot. Hanya memerlukan kurang lebih 30 menit perjalanan ke pelabuhan Desa Pondong dan dilanjutkan perjalanan laut menggunakan kelotok sekitar 15 menit. Apabila ditempuh dengan melakukan jalan darat dari ibukota Tana Paser menuju arah Penajam (Kabupaten Penajam Paser Utara). Setibanya di Desa Modang Kecamatan Kuaro ikuti jalan masuk dengan pemandangan kanan kiri kebun sawit. Jalan sepanjang 14 kilometer dengan kontur jalan berbatu kecil rata, bergelombang landai maka terbalas semua lelah menjadi indah. Dan keberadaan kapal “tua” (tampak foto), adalah kapal barang “phinisi” yang terdapat di pantai Tanjung Aru yang kemudian ditarik ke Pasir Mayang atas ijin pemiliknya yang kemudian menjadi ikon pantai Pasir Mayang.

Di lokasi ini dapat dijumpai hamparan Paser putih yang tidak kalah indahnya dengan pantai pantai lain di Kalimantan. Pantai ini cocok untuk rekreasi bersama keluarga karena tempatnya rindang pepohonan serta pantai dengan ombaknya yang tipis-tipis sehingga aman untuk bermain.

e. Wisata Mangrove “Lati Tuo”



Sebenarnya sejak 2022 lokasi ini sudah menjadi objek tujuan wisata namun belum ada sentuhan-sentuhan artistic lainnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, dilakukan penataan yang dibina oleh Dinas Pariwisata Kab. Paser. Dan puncaknya pada 2 Juli 2026 ditetapkan sebagai Juara I Desa Wisata Tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Wisatawan bisa menikmati segarnya udara, jajanan tradisional hingga tingkah lucu monyet penghuni mangrove.

BAB III
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PASER

A. VISI & MISI

1. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser

   Sebagaimana tujuannya untuk membahagiakan masyarakat Kabupaten Paser, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai visi.

   Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser ini dapat diuraikan sebagai berikut :

   a. Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Profesional. Yakni pelaksanaan kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu didasarkan pada kemampuan nyata pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka menciptakan pelayanan jasa secara efektif, efisien dan bersih.
   b. Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib. Yaitu dalam melaksanakan kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu mengikuti alur, syarat dan prosedur yang baku serta sesuai ketentuan yang berlaku serta ada kepastian dalam hal biaya serta jaminan ketepatan layanan.
   c. Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akurat. Yaitu dalam melaksanakan kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu memperhatikan agar data yang diberikan oleh obyek pelayanan adalah data yang benar, valid dan ada dokumen pendukungnya di samping itu proses pelayanan mulai verifikasi,

pemrosesan dalam sistem sampai dengan penyerahan hasilnya juga dilaksanakan sesuai standar yang sudah baku.

d. Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dinamis. Yaitu dalam melaksanakan kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sekaligus pemanfaatan data yang ada atau yang tersimpan dalam *database* kependudukan adalah data yang paling terakhir dan mutakhir mengikuti perkembangan waktu sehingga setiap perubahan data dapat ter-*update* secara *realtime*.

2. Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser

Sedangkan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kinerja pelayanan aparatur terhadap kebutuhan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
b. Meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi informasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
c. Meningkatkan penyebarluasan informasi, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
d. Melaksanakan dan mengembangkan sistem pelaporan dan pelayanan administrasi secara profesional dan transparan dengan didukung oleh sarana prasarana yang memadai.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Bahwasannya peraturan ini merupakan bentuk keseriusan

Pemerintah Kabupaten Paser dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan menggerakkan segala potensi guna mensukseskan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) hingga ke desa dan kelurahan. Dengan mempedomani peraturan dimaksud, berikut susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Jabatan Fungsional
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan jabatan fungsional
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan jabatan fungsional
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahkan jabatan fungsional
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahkan jabatan fungsional

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sedangkan struktur organisasi berdasarkan susunan organisasi diatas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dengan type A Maksimal dapat disuguhkan pada lampiran di bagian lain.

Struktur organisasi ini cukup lebar dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Paser secara maksimal dengan berbagai karaktaristik dan kesulitannya.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada 01 Januari – 31 Desember 2022 hingga awal 2023 ini berjumlah 59 Orang. Jumlah ini dipengaruhi banyaknya pejaba yang belum berisi disebabkan oleh prasyarat menjadi pejabat fungsional memerlukan kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas tersendiri. Oleh karena tidak terpenuhinya pejabat dimaksud maka banyak jabatan kosong pada Dinas Dukcapil pada tahun 2023 sebagaimana dengan rincian seperti pada tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 3.1. Rekapitulasi Pegawai Disdukcapil Kabupaten Paser Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	1	0	1
2	Sekretaris	0	1	1
3	Kepala Bidang	1	1	2
4	Kepala Subbag	1	1	2
5	Pejabat Fungsional	1	4	5
6	Staf Fungsional (PNS/ASN)	21	35	56
7	Staf (Honorer)	2	4	6
	Jumlah	26	46	73

Sumber Data : Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Paser 2026

Tabel diatas menunjukkan jumlah pegawai Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, berdasarkan jenis kelamin. Tabel diatas menjelaskan bahwa pegawai berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada jenis kelamin laki-laki. Namun proporsi dalam penempatan tugas pokok dan fungsi tetap cukup berimbang. Penempatan ini telah sesuai dengan analisis jabatan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Analisis jabatan dilaksanakan secara berkala oleh Bidang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

Tabel 3.2. Rekapitulasi Pegawai Disdukcapil Kabupaten Paser Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	PNS/ASN	STAF/HONORER	JUMLAH
1	SD/Sederajat	0	0	0
2	SLTP/Sederajat	0	0	0
3	SLTA/Sederajat	18	2	19
4	Diploma I	0	0	0
5	Diploma II	0	0	0
6	Akademi/Diploma III	4	0	6
7	Strata I	37	4	32
8	Strata II	2	0	2
	Jumlah	61	6	67

Sumber : Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Paser 2026

Dari data diatas tercermin bahwa seluruh pegawai memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang guna pelaksanaan tugas yang diemban. Dengan demikian setiap permasalahan yang timbul baik dalam hal pelayanan maupun administrasi dapat terselesaikan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dalam sebuah instansi/lembaga pemerintah adalah merupakan kerja kolektif yang dipandu melalui bidang kerja dan tugas masing-masing. Tanggung jawab dan peran yang diemban tidak terlepas dari petunjuk teknis. Kemudian dari petunjuk teknis dijabarkan melalui kerangka kerja agar penerapannya tidak menyalahi aturan.

Keberimbangan pendidikan berpengaruh kepada kinerja dinas secara kolektif. Dimana, pimpinan dan staf mampu menciptakan sinergitas kerja yang muaranya dapat memacu dan memicu hasil kerja yang dapat dinikmati oleh masyarakat Paser pada umumnya. Antara input dan output yang ditorehkan tersambung dan tidak ada putusnya.

BAB IV
KUANTITAS PENDUDUK

A. Persebaran (Distribusi) Penduduk

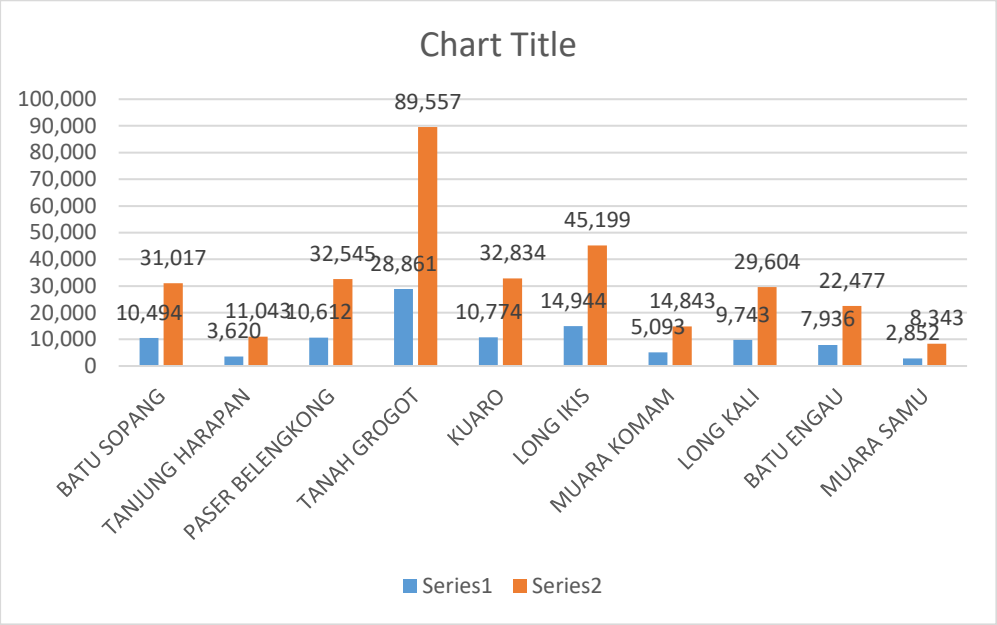
1. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Penduduk di Kabupaten Paser tersebar tidak merata. Dengan luas wilayah 11.603,94 km^2 berpenduduk sebanyak 317.462 jiwa, yang terdiri dari 164.210 jiwa laki-laki dan 153.252 jiwa perempuan. Persebaran di 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Batu Sopang, Tanjung Harapan, Paser Belengkong, Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis, Muara Komam, Long Kali, Batu Engau dan Muara Samu. Pada tabel 1 dibawah ini menjelaskan bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tanah Grogot yaitu 89.557 jiwa (28,21 %), sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Muara Samu yakni sebanyak 8.343 Jiwa (2,63 %).

Tabel 4.1. Data Kepala Keluarga dan Jiwa Menurut Jenis Kelamin

WILAYAH	KEPALA KELUARGA		JIWA	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
BATU SOPANG	8.843	1.651	16.312	14.705
TANJUNG HARAPAN	3.035	585	5.787	5.256
PASER BELENGKONG	8.869	1.743	16.770	15.775
TANAH GROGOT	23.325	5.536	45.481	44.076
KUARO	8.919	1.855	16.874	15.960
LONG IKIS	12.265	2.679	23.296	21.903
MUARA KOMAM	4.037	1.056	7.822	7.021
LONG KALI	8.019	1.724	15.472	14.132
BATU ENGAU	6.788	1.148	11.948	10.529
MUARA SAMU	2.417	435	4.448	3.895
PASER	**86.517**	**18.412**	**164.210**	**153.252**

Sumber Data : DKB SMT I 2026 Dinas Dukcapil Kab. Paser



Gambar 4.1 Data Jumlah KK dan Jiwa

Sumber Data : DKB SMT I 2026 Dinas Dukcapil Kab. Paser

Data diatas menunjukkan bahwa di Kabupaten Paser jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Kondisi ini berada pada seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Paser.

2. Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk adalah jumlah orang yang tinggal per satuan luas pada wilayah suatu daerah. Satuan kepadatannya adalah jiwa/hektar, orang/hektar, jiwa/km², atau orang/km². Kabupaten Paser masih tergolong ke wilayah kabupaten yang cukup jarang penduduknya. Di wilayah Kabupaten Paser tingkat kepadatan penduduk masuk kategori sedang. Hal ini nampak jelas pada tabel selanjutnya. Dimana tabel ini menghitung jumlah penduduk yang dibandingkan dengan luas wilayah per kecamatan sehingga nampak sekali, penduduk Kabupaten Paser masih layak untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan kerja ataupun usaha dengan sasaran pertanian,

perkebunan, perikanan, dan sebagainya. Adapun secara geografis sudah jelas dideskripsikan dibagian lain.

Tabel 4.2. Data Kepadatan Penduduk

NO	WILAYAH	JUMLAH JIWA	LUAS WIL (KM²)	% KEPADATAN
1	BATU SOPANG	31.017	1.177,38	26,34
2	TANJUNG HARAPAN	11.043	714,05	15,47
3	PASER BELENGKONG	32.545	990,11	32,87
4	TANAH GROGOT	89.557	38,58	2.321,33
5	KUARO	32.834	666,76	49,24
6	LONG IKIS	45.199	1.371,37	32,96
7	MUARA KOMAM	14.843	1.804,75	8,22
8	LONG KALI	29.604	2.455,39	12,06
9	BATU ENGAU	22.477	1.520,26	14,78
10	MUARA SAMU	8.343	865,29	9,64
	JUMLAH	**317.462**	**11.603,94**	27,36

Sumber Data : DKB SMT I 2026 Dinas Dukcapil Kab. Paser

Gambar 4.2. Data Kepadatan Penduduk

Namun apabila dicermati per kecamatan ada 1 (satu) kecamatan terpadat yakni Kecamatan Tanah Grogot dengan kepadatan penduduk mencapai 2.321,33. Hal ini terjadi karena Kecamatan Tanah Grogot memiliki luas wilayah paling kecil sementara jumlah penduduknya paling banyak. Dan dapat diperinci lagi bahwa ada 2 (dua) kecamatan yang masih dibawah 2 (dua) digit kepadatannya yakni Kecamatan Muara Komam 8,22 jiwa/km² dan Kecamatan Muara Samu 9,64 jiwa/km². dan yang masuk dalam 2 (dua) digit dari yang paling rendah hingga tinggi antara lain Kecamatan Long Kali 12,06 jiwa/km², Batu Engau 14,78 jiwa/km², Tanjung Harapan 15,47 jiwa/km², Batu Sopang 26,34 jiwa/km², Paser Belengkong 32,87 jiwa/km², Long Ikis 32,96 jiwa/km² dan Kuaro 49,24 jiwa/km².

Dengan tingkat kepadatan penduduk per wilayah di Kabupaten Paser yang tidak merata diperlukan perencanaan persebaran penduduk, tata ruang dan tata guna lahan/tanah,

sehingga penduduk tidak terkonsentrasi di satu wilayah saja. Jika ketiga hal dimaksud kemudian dipadukan dengan tata kelola yang tepat, maka ke depan Kabupaten Paser akan menjadi sebuah kabupaten yang maju mandiri dan sejahtera. Perencanaan tata ruang dan wilayah sebagai pengalihan pemanfaatan fungsi hutan perlu penataan yang tertata, teratur, rapi dan berdaya saing yang dirancang dalam pembangunan yang berkeadilan dimasa akan datang.

3. Pertumbuhan Penduduk

Berbicara tentang pertumbuhan penduduk per tahunnya di Kabupaten Paser, secara dinamisasinya tentu tidak terlepas dari peristiwa kelahiran, kematian, pindah masuk dan pindah keluar. Kondisi ini kemudian dapat diakumulasikan dengan hasil konsolidasi data kependudukan yang telah “dibersihkan” oleh Dirjen Dukcapil. Dapat dijelaskan bahwa Data Konsolidasi Bersih (DKB) adalah hasil rangkaian kegiatan pembersihan, verifikasi, validasi, dan konsolidasi data seluruh Indonesia untuk menghasilkan data bersih dari data anomaly dan data ganda oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013.

Pertumbuhan penduduk pertengahan tahun 2026 di Kabupaten Paser dapat diketahui bahwa jumlah penduduk pada DKB SMT I Tahun 2026 sejumlah 317.462 jiwa, dikurangkan dengan jumlah penduduk DKB SMT I Tahun 2025 berjumlah 312.223 jiwa menghasilkan 5.239 jiwa termasuk hasil pendalaman LAMPID (Lahir, Mati, Pindah dan Datang) kemudian dikalikan 100 maka hasilnya 1,73 %. Maka pertumbuhan penduduk Kabupaten Paser selama 2026 sebesar 1,73 %.

B. Komposisi Penduduk Menurut Karaktaristik Demografi

1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Pengklasifikasian penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Masing-masing kelompok umur mempunyai keperluan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan pelayanan bidang kesehatan dari penyediaan nutrisi, gizi, pola asuh yang baik, penyediaan permainan edukasi dan tumbuh kembang anak. Penduduk usia sekolah akan terkait sekali dengan kebutuhan layanan pendidikan dalam arti luas seperti sarana prasarana pendidikan, tenaga pendidik, dan kebutuhan lain yang sesuai termasuk didalamnya tersedianya sarana prasana pengembangan karaktar, seni dan olah raga. Begitu pula dengan usia kerja, instansi berwenang melalui program kegiatannya dapat mengalokasikan anggarannya sesuai peruntukannya. Terbukanya lapangan kerja melalui bursa tenaga kerja, informasi lowongan, pelatihan keahlian dan ketrampilan dan sebagainya. Sementara kebutuhan lanjut usia tentu terkait layanan lansia seperti kesehatan dan sosial.

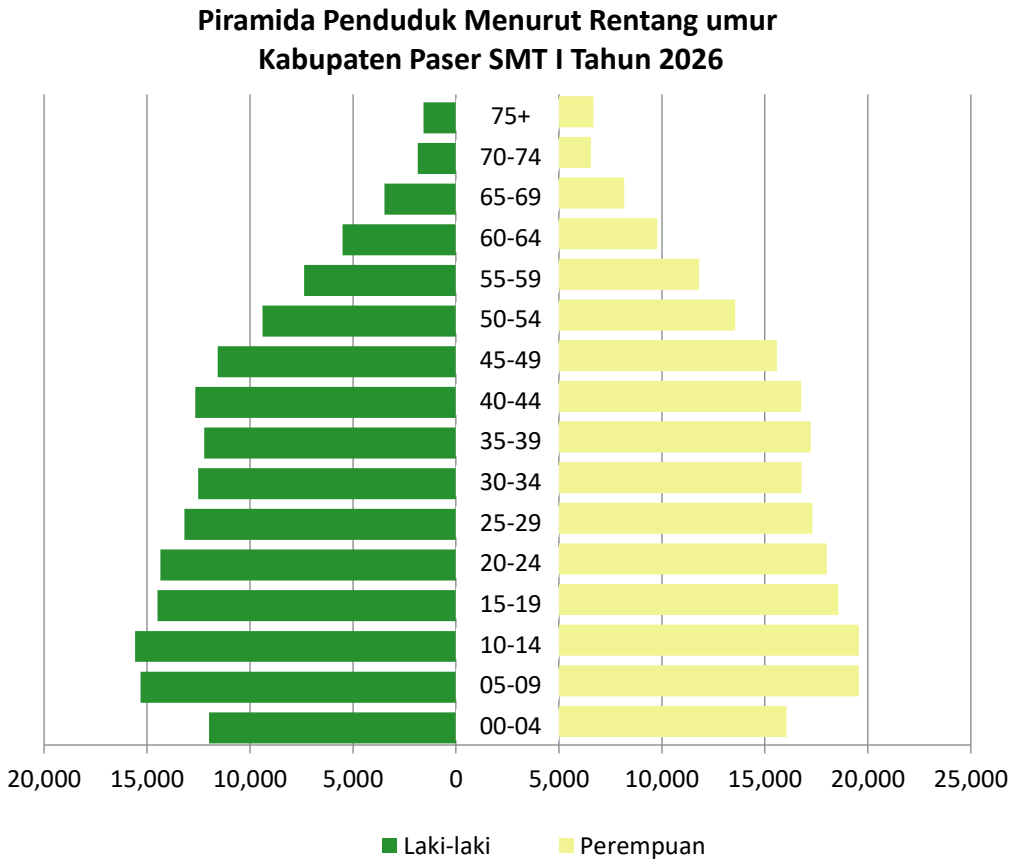
Adapun kegunaan atau manfaat dari Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin antara lain:

- **Perencanaan Pembangunan:** Mengetahui jumlah fasilitas yang dibutuhkan seperti sekolah untuk usia anak, fasilitas kesehatan untuk lansia, dan lapangan kerja untuk usia produktif.
- **Analisis Ketenagakerjaan:** Menentukan jumlah penduduk usia produktif (biasanya 15–64 tahun) guna mengukur potensi angkatan kerja.

- **Kebijakan Kesehatan Masyarakat:** Membantu Badan Pusat Statistik dan pemerintah merancang program imunisasi anak, kesehatan reproduksi, hingga layanan geriatri.
- **Proyeksi Demografi:** Memprediksi pertumbuhan penduduk di masa depan menggunakan grafik piramida penduduk.

Apabila ada sebuah perencanaan program kerja sebuah lembaga/instansi yang tidak didasarkan pada data-data seperti ini dapat dipastikan tidak tepat sasaran. Sasaran kegiatan merupakan data nyata yang ada di masyarakat. Sebab sasaran kegiatan instansi/lembaga dipastikan adalah penduduk. Untuk lebih jelas melihat data dibawah ini.

Gambar 4.3. Data Penduduk Menurut Rentang Umur



Sumber Data : DKB SMT I 2026 Dinas Dukcapil Kab. Paser

2. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Keberadaan penduduk suatu wilayah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, satu diantaranya berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin penduduk dapat dikelompokkan menjadi penduduk laki-laki dan perempuan. Sementara berdasarkan umur, penduduk dapat dikelompokkan menurut ukuran rentang usia tertentu, misalnya 1 tahunan, 2 tahunan, 3 tahunan, 4 tahunan dan seterusnya. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan umur dapat menunjukkan data penduduk, seperti jumlah tenaga kerja produktif dan nonproduktif, pertambahan penduduk, dan angka ketergantungan.

Data penduduk tersebut harus diperhitungkan untuk mempersiapkan dan menetapkan kebijakan suatu daerah atau negara. Keadaan penduduk usia produktif tertentu berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai lapangan pekerjaan, jumlah pengangguran dan upaya mengatasi masalah yang ada. Sex ratio adalah perbandingan antara banyaknya jumlah penduduk laki-laki dengan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Dinyatakan dalam banyak penduduk laki-laki per 100 orang perempuan.

Cara penghitungan sex ratio ada rumus :

$$\text{Sex Ratio} = \frac{L}{P} \times 100$$

Dimana: L = jumlah penduduk laki-laki
P = jumlah penduduk perempuan
100 = konstante

Maka dengan rumus diatas akan didapatkan angka-angka sebagai berikut :

Jumlah Penduduk Laki-laki : 164.210

Jumlah Penduduk Perempuan : 153.252

$$\text{SEX RATIO} = \frac{164{,}210}{153{,}252} \text{ X } 100$$

$$= 107.15$$

Dengan demikian sex ratio di Kabupaten Paser pada semester I Tahun 2026 ini dapat diartikan setiap 100 (seratus) perempuan maka terdapat 107 (seratus tujuh) laki-laki.

3. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan dengan istilah lain Defendency Ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah pendduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Dalam suatu kelompok masyarakat, tidak semua masyarakat masuk dalam kategori produktif, ada pula golongan masyarakat yang dikategorikan tidak produktif. Untuk mengetahui kualitas produktivitas secara umum dari suatu masyarakat, dibutuhkan rasio yang memperhitungkan kedua faktor ini.

Golongan **masyarakat produktif** adalah masyarakat yang berada pada golongan umur **15-64 tahun**. Golongan umur ini dianggap dapat berkerja dan berkontribusi secara ekonomi maupun sosial kepada negara. Sedangkan golongan masyarakat **non-produktif** adalah masyarakat yang berada pada golongan umur **0-14 tahun** dan **65 tahun keatas**. Golongan umur **0-14 tahun** ini dianggap belum mampu dan umur **65 tahun keatas** sudah tidak mampu untuk bekerja, sehingga dianggap tidak dapat berkontribusi.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ketergantungan total dari suatu populasi. Rumusnya adalah jumlah penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun) dibagi dengan jumlah penduduk produktif (15-64 tahun) lalu dikalikan

100. Jika menggunakan rumus ini, didapatkan jumlah penduduk tidak produktif yang bergantung pada 100 orang penduduk usia produktif. Selain rasio ketergantungan total, terdapat pula rasio ketergantungan anak. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus diatas. Rumusnya adalah jumlah penduduk umur 0-14 tahun dibagi dengan jumlah penduduk berumur 15-64 lalu hasilnya dikalikan 100. Selain rasio total dan rasio anak, rasio penduduk usia tua pun dapat dihitung. Rumusnya adalah jumlah penduduk dengan umur 65 atau lebih dibagi dengan jumlah penduduk berumur 14-64 dan hasilnya dikalikan dengan 100. Maka sebelum membahas lebih lanjut terkait penjabaran, maka perlu ditampilkan tabel yang menunjukkan cluster atau kelompok umur sebagaimana dimaksud dalam pembahasan ini, agar memperjelas kondisi dan jumlah penduduk sebenarnya.

Tabel 4.3. Penduduk Umur (PU) Non Produktif 0 – 14 Tahun

No	PENDUDUK UMUR (Th)	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	00 - 04	11.556	10.601	22.157
2	05 - 09	15.111	14.610	29.721
3	10 - 14	15.774	14.574	30.348
Jumlah		**42.441**	**39.785**	**82.226**

Sumber Data : DKB SMT I 2026 Dinas Dukcapil Kab. Paser

Sebagaimana tabel 4.3. tersebut menunjukkan Data Penduduk Umur (PU) Non Produktif usia 0-14 tahun yang tercermin melalui 3 (tiga) kelompok rentang umur. Dari usia 0-4 tahun, 5-9 tahun, dan 10-14 tahun. Jumlah laki-laki dan perempuan dengan total 82.226 jiwa. Mendukung kebutuhan data untuk program tumbuh kembang anak dan remaja.

Tabel 4.4. Penduduk Umur (PU) Non Produktif 65 ke atas

No	RENTANG UMUR (Th)	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	65 - 69	3.517	3.208	6.725

2	70 - 74	1.941	1.633	3.574
3	>= 75	1.630	1.732	3.362
Jumlah		**7.088**	**6.573**	**13.661**

Sumber Data : DKB SMT I 2026 Dinas Dukcapil Kab. Paser

Pada tabel 4.4. menggambarkan Data Penduduk Umur (PU) Non Produktif usia 65 tahun keatas yang tercermin melalui 3 (tiga) kelompok rentang umur. Terdapat jumlah laki-laki dan perempuan dengan total 13.661 jiwa. Sehingga PU 0-14 tahun sebanyak 82.226 jiwa dan PU 65 tahun keatas 13.661 jiwa.

Selanjutnya tabel dibawah ini menyajikan Data Penduduk Umur (PU) Produktif, direntang usia 15 hingga 64 tahun.

Tabel 4.5. Penduduk Umur (PU) Produktif (15-64 tahun)

No	PENDUDUK UMUR (Th)	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	15 - 19	14.904	14.008	28.912
2	20 - 24	14.437	13.208	27.645
3	25 - 29	13.329	12.421	25.750
4	30 - 34	12.586	11.801	24.387
5	35 - 39	12.230	12.224	24.454
6	40 - 44	12.843	11.884	24.727
7	45 - 49	11.602	10.672	22.274
8	50 - 54	9.626	8.799	18.425
9	55 - 59	7.435	6.925	14.360
10	60 - 64	5.689	4.952	10.641
Jumlah		**114.681**	**106.894**	**221.575**

Sumber Data : DKB SMT I 2026 Dinas Dukcapil Kab. Paser

Pada tabel 4.5. menjabarkan Data Penduduk Umur (PU) Produktif usia 15-64 tahun yang tercermin melalui 10 (sepuluh) kelompok rentang umur. Terdapat jumlah laki-laki 114.681 jiwa dan perempuan 106.894 jiwa dengan total 221.575 jiwa.

Kemudian dari tabel diatas didapat atas penjabarannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{PU(0-14 Th) + PU (65 Th ke atas)}}{\text{Pddk Umur 15-64 Th}} \text{ X } 100\ \%$$

$$= \frac{(82.226 + 13.661)}{221.575} \text{ X } 100\% = 43{,}27$$

Hasil perhitungan diatas dinyatakan bahwa pada DKB SMT II Tahun 2025 sebagian besar penduduk Kabupaten Paser adalah kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun), yang mencapai 221.575 jiwa, kemudian kelompok usia non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas) mencapai 95.887 jiwa, sehingga Angka Rasio Ketergantungan ditemukan sebesar 43,27%, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Paser menanggung 43 orang yang non produktif.

C. Komposisi Penduduk Menurut Karaktaristik Sosial

1. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk pada suatu wilayah memberikan gambaran tentang kualitas sumberdaya manusia yang tinggal di daerah tersebut. Sebuah kabupaten yang maju tingkat pendidikan penduduknya termasuk tinggi, sebaliknya dengan wilayah-wilayah berkembang, apalagi daerah miskin, dipastikan penduduknya berpendidikan rendah. Tapi mungkin ini teori yang suatu saat terbantahkan. Terdapat beberapa ukuran untuk melihat keadaan pendidikan suatu daerah diantaranya :

a. Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun pelajaran penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal.
b. Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidunya sehari-hari.

c. Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. tingkat pendidikannya rendah.

Namun dalam penyajian kali ini tidak menampilkan data sebagaimana pembahasan diatas. Sebab pembahasan diatas adalah domain dari Dinas Pendidikan. Sajian data dalam tabel dibawah ini untuk menampilkan data penduduk Kabupaten Paser berdasarkan jenjang pendidikan menurut jenis kelamin. Data ini diperoleh dari hasil pelayanan selama tahun 2026 dan telah melewati kegiatan validasi data menurut Data Kependudukan Bersih (DKB), oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Tersaji data penduduk menurut pendidikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.6. Data Penduduk Menurut Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	Tidak/Belum Sekolah	41.469	39.082	80.551	25,37
2	Belum Tamat SD/Sederajat	20.947	19.941	40.888	12,88
3	Tamat SD/Sederajat	34.133	35.485	69.618	21,93
4	Tamat SLTP/Sederajat	21.478	19.753	41.231	12,99
5	Tamat SLTA/Sederajat	37.701	27.971	65.672	20,69
6	Diploma I/II	444	561	1.005	0,32
7	Diploma III	1.276	2.111	3.387	1,07
8	Diploma IV/Strata I	6.325	8.071	14.396	4,53
9	Strata II	423	271	694	0,22
10	Strata III	14	6	20	0,01
	Jumlah	**164.210**	**153.252**	**317.462**	**100,00**

Sumber Data : DKB SMT I 2026 Dinas Dukcapil Kab. Paser

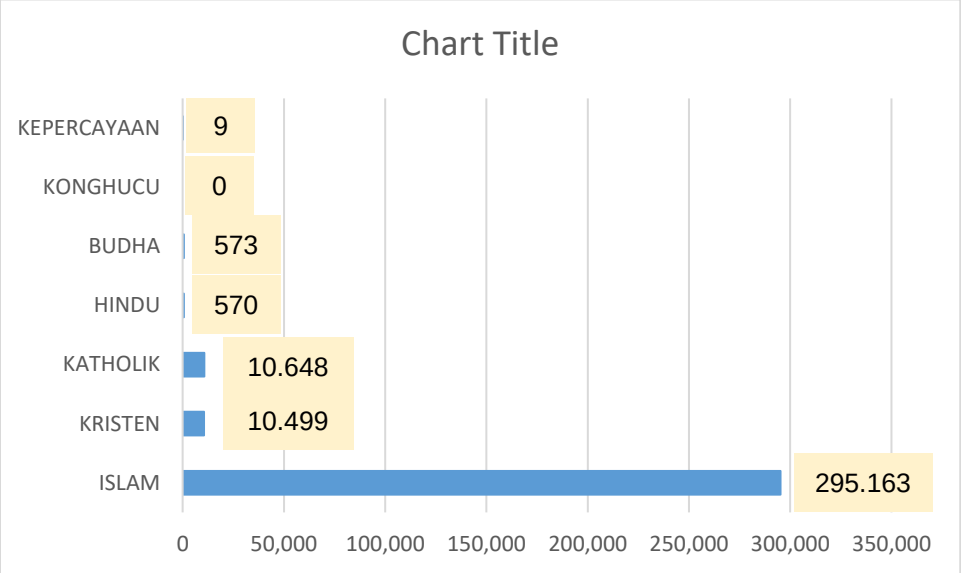
2. Penduduk Berdasarkan Agama

Informasi kependudukan mengenai jumlah penduduk Kabupaten Paser berdasarkan agama termuat dalam tabel selanjutnya. Data ini dimaksudkan tidak hanya untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan namun yang lebih penting dari itu adalah pemanfaatan potensi keumatan. Disamping itu untuk perencanaan suatu program

kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama, kesetaraan, kesempatan, perlindungan, keamanan, kesejahteraan dan sebagainya. Penduduk Kabupaten Paser yang memeluk agama Islam (92,98%), disusul agama Kristen (3,31%) dan Katholik (3,35%). Sedangkan Hindu (0,18%), Budha (0,18%) dan Konghucu (0,0%) serta aliran kepercayaan (0,0%). Laporan ini telah menandakan pembaharuan pencatatan. Ke depan barangkali akan termuat data penduduk yang dari kepercayaannya. Sehingga data penduduk menampilkan agama dan kepercayaan. Hal ini untuk mengakomodir kondisi nyata penduduk di Kabupaten Paser.

Gambar 4.4. Data Penduduk Menurut Agama

NO	AGAMA	JUMLAH	%
1	ISLAM	295.163	92,98
2	KRISTEN	10.499	3,31
3	KATHOLIK	10.648	3,35
4	HINDU	573	0,18
5	BUDHA	570	0,18
6	KONGHUCU	0	0,00
7	KEPERCAYAAN	9	0,00
	JUMLAH	317.462	100,00



Sumber Data : DKB SMT I 2026 Dinas Dukcapil Kab. Paser

3. Penduduk Berdasarkan Status Kawin

Penyajian berikutnya adalah data penduduk berdasarkan status perkawinan merupakan suatu keharusan bagi *stake holder* maupun pengambil dan pengampu kebijakan. Catatan laporan ini di cut off sampai dengan semester I tahun 2026 yang tentu akan berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan. Penyusun berupaya menampilkan per jenis kelamin agar dapat mempermudah pengklasifikasian sesuai wilayah.

Tabel 4.8. Data Penduduk Menurut Status Perkawinan

NO	KECAMATAN	BELUM KAWIN			KAWIN		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	BATU SOPANG	8.977	7.000	15.977	6.907	6.732	13.639
2	TANJUNG HARAPAN	3.010	2.315	5.325	2.645	2.601	5.246
3	PASER BELENGKONG	8.517	6.878	15.395	7.668	7.554	15.222
4	TANAH GROGOT	23.985	20.318	44.303	19.885	19.672	39.557
5	KUARO	8.548	6.908	15.456	7.714	7.679	15.393
6	LONG IKIS	11.879	9.589	21.468	10.540	10.357	20.897
7	MUARA KOMAM	4.170	3.044	7.214	3.355	3.327	6.682

8	LONG KALI	8.275	6.479	14.754	6.638	6.457	13.095
9	BATU ENGAU	6.023	4.505	10.528	5.546	5.331	10.877
10	MUARA SAMU	2.355	1.761	4.116	1.941	1.885	3.826
TOTAL		**85.739**	**68.797**	**154.536**	**72.839**	**71.595**	**144.434**

Sumber Data : DKB SMT I 2026 Dinas Dukcapil Kab. Paser

Lanjutan Tabel 4.8. Data Penduduk Menurut Status Perkawinan

NO	KECAMATAN	CERAI HIDUP			CERAI MATI		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	BATU SOPANG	187	299	486	171	567	738
2	TANJUNG HARAPAN	40	47	87	78	252	330
3	PASER BELENGKONG	229	279	508	279	954	1233
4	TANAH GROGOT	780	1160	1940	663	2661	3324
5	KUARO	238	290	528	323	1009	1332
6	LONG IKIS	335	404	739	416	1373	1789
7	MUARA KOMAM	85	110	195	175	495	670
8	LONG KALI	198	243	441	303	851	1154
9	BATU ENGAU	138	180	318	183	429	612
10	MUARA SAMU	65	64	129	68	160	228

Sumber Data : DKB SMT I 2026 Dinas Dukcapil Kab. Paser

Tabel ini menyajikan penduduk berstatus perkawinan secara terinci laki-laki dan perempuan. Nampak dalam tabel penduduk laki-laki yang berstatus kawin lebih banyak sedikit dibanding perempuan. Apabila dicermati hal ini terjadi karena banyaknya penduduk (suami istri) memilih untuk tinggal beda kota karena berbagai sebab. Bisa karena rumah tinggal, pekerjaan, pendidikan dan yang lainnya. Sementara itu penduduk laki-laki berstatus belum kawin lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan. Hal ini terjadi karena biasanya laki-laki masih meneruskan pendidikan atau baru mulai bekerja, sehingga menunda perkawinan. Begitupun laki-laki yang diproyeksikan menjadi kepala keluarga

yang harus membiayai kebutuhan keluarga. Harus memiliki rencana matang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Disisi lain menarik untuk diperhatikan pada status cerai hidup, bahwa proporsi penduduk berstatus cerai hidup lebih besar pada perempuan dari pada laki-laki. Hal ini lebih dipengaruhi oleh sikap umum yang ada pada perempuan. Ketika cerai hidup terjadi kebanyakan dari perempuan itu tidak melakukan perkawinan kembali, apalagi anak-anaknya sudah besar dan sebagainya. Kemungkinan adanya trauma, atau karena pertimbangan lainnya. Terkait dengan hal dimaksud tentu pengaruhnya sangat banyak.

4. Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Pada perkembangannya sistem layanan administrasi kependudukan selalu mengalami perubahan mengikuti "perkembangan jaman". Oleh karenanya dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mengakomodir jenis pekerjaan yang terbagi menjadi 99 (sembilan puluh sembilan). Mulai dari "belum bekerja" hingga "pekerjaan lainnya". Dan apa yang ditentukan oleh peraturan-peraturan yang menaungi pelayanan administrasi kependudukan dinilai tepat dan dapat mengakomodir keseluruhannya. Jenis pekerjaan seluruhnya spesifik sesuai kriteria pekerjaan penduduk Kabupaten Paser.

Pada tabel berikut menunjuk jelaskan penduduk Paser dengan segala jenis pekerjaan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan perubahan jenis pekerjaan, mensyaratkan dokumen syah untuk pekerjaan formal seperti ASN/PNS, TNI, Polri, Karyawan Swasta, Karyawan BUMN/BUMD dan lainnya, yang sifatnya diangkat berdasarkan SK (Surat Keputusan). Hal ini didasarkan oleh Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tatacara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sementara untuk jenis pekerjaan yang non formal, tidak disyaratkan. Hal ini dikarenakan jenis

pekerjaan tersebut tidak ada satupun lembaga atau instansi yang menanganinya, sebab bersifat informal.

Dari sejumlah 99 (sembilan puluh sembilan) jenis pekerjaan dimaksud, ada pada beberapa jenis pekerjaan yang menunjukkan angka 0, hal ini diakibatkan oleh tidak adanya penduduk Kabupaten Paser berpekerjaan itu.

Tabel 4.9. Data Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

NO	JENIS PEKERJAAN	PENDUDUK (JENIS KELAMIN)		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	45.675	40.386	86.061
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	69.907	69.909
3	PELAJAR/MAHASISWA	30.264	26.460	56.724
4	PENSIUNAN	1.064	367	1.431
5	APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)	2.444	2.230	4.674
6	TNI	182	1	183
7	POLRI	706	33	739
8	PERDAGANGAN	227	96	323
9	PETANI/PEKEBUN	21.722	2.424	24.146
10	PETERNAK	25	3	28
11	NELAYAN/PERIKANAN	5.057	29	5.086
12	INDUSTRI	8	4	12
13	KONSTRUKSI	11	1	12
14	TRANSPORTASI	23	0	23
15	KARYAWAN SWASTA	14.730	2.260	16.990
16	KARYAWAN BUMN	1.107	281	1.388
17	KARYAWAN BUMD	105	50	155
18	KARYAWAN HONORER	1.413	1.654	3.067
19	BURUH HARIAN LEPAS	2.161	135	2.296
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1.192	141	1.333
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	113	3	116
22	BURUH PETERNAKAN	7	0	7
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	0	31	31
24	TUKANG CUKUR	5	0	5
25	TUKANG LISTRIK	3	1	4
26	TUKANG BATU	75	0	75
27	TUKANG KAYU	110	0	110
28	TUKANG SOL SEPATU	2	0	2
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	8	0	8
30	TUKANG JAHIT	27	14	41
31	TUKANG GIGI	1	0	1

32	PENATA RIAS	3	4	7
33	PENATA BUSANA	0	1	1
34	PENATA RAMBUT	5	2	7
35	MEKANIK	79	0	79
36	SENIMAN	6	0	6
37	TABIB	1	0	1
38	PARAJI	0	5	5
39	PERANCANG BUSANA	0	1	1
40	PENERJEMAH	1	0	1
41	IMAM MASJID	21	0	21
42	PENDETA	56	15	71
43	PASTOR	6	0	6
44	WARTAWAN	14	1	15
45	USTADZ/MUBALIGH	35	1	36
46	JURU MASAK	0	0	0
47	PROMOTOR ACARA	0	0	0
48	ANGGOTA DPR RI	0	0	0
49	ANGGOTA DPD RI	0	0	0
50	ANGGOTA BPK	0	0	0
51	PRESIDEN	0	0	0
52	WAKIL PRESIDEN	0	0	0
53	ANGGOTA MAHKAMAH	0	0	0
54	ANGGOTA KABINET	0	0	0
55	DUTA BESAR	0	0	0
56	GUBERNUR	0	0	0
57	WAKIL GUBERNUR	0	0	0
58	BUPATI	0	0	0
59	WAKIL BUPATI	1	0	1
60	WALIKOTA	0	0	0
61	WAKIL WALIKOTA	0	0	0
62	ANGGOTA DPRD PROP.	1	1	2
63	ANGGOTA DPRD KAB/KOTA	7	1	8
64	DOSEN	27	22	49
65	GURU	696	1.465	2.161
66	PILOT	1	0	1
67	PENGACARA	10	1	11
68	NOTARIS	3	3	6
69	ARSITEK	3	1	4
70	AKUNTAN	0	1	1
71	KONSULTAN	9	4	13
72	DOKTER	50	101	151
73	BIDAN	0	318	318
74	PERAWAT	136	226	362
75	APOTEKER	10	52	62

76	PSIKIATER/PSIKOLOG	1	3	4
77	PENYIAR TELEVISI	0	0	0
78	PENYIAR RADIO	0	0	0
79	PELAUT	15	0	15
80	PENELITI	1	1	2
81	SOPIR	570	1	571
82	PIALANG	0	0	0
83	PARANORMAL	0	0	0
84	PEDAGANG	846	364	1.210
85	PERANGKAT DESA	121	133	254
86	KEPALA DESA	39	0	39
87	BIARAWATI	0	10	10
88	WIRASWASTA	32.911	3.957	36.868
89	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA	11	2	13
90	ARTIS	0	0	0
91	ATLIT	0	0	0
92	CHEFF	0	0	0
93	MANAJER	0	0	0
94	TENAGA TATA USAHA	5	2	7
95	OPERATOR	0	0	0
96	PEKERJA PENGOLAHAN	0	0	0
97	TEKNISI	1	0	1
98	ASISTEN AHLI	0	1	1
99	GEMBALA	0	0	0
100	USKUP	0	0	0
101	BIARAWAN	0	0	0
102	PANDITA	0	0	0
103	PINANDITA	0	0	0
104	BHIKKHU	0	0	0
105	XUESHI	0	0	0
106	WENSI	0	0	0
107	JIAOSHENG	0	0	0
108	LAINNYA	39	41	80
	TOTAL	**164.210**	**153.252**	**317.462**

Sumber : DKB SMT I 2026 Dinas Dukcapil Kab. Paser

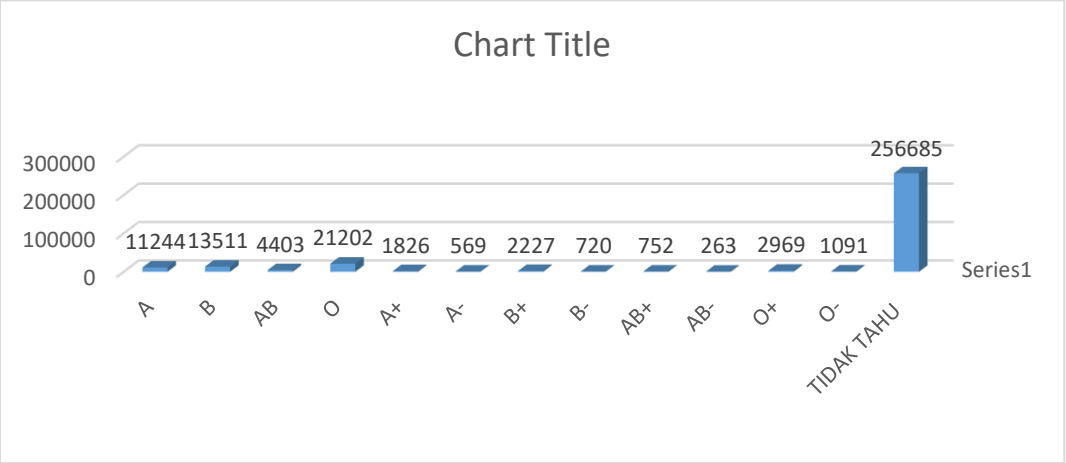
5. Penduduk Berdasarkan Golongan Darah

Golongan darah dimiliki oleh setiap jiwa atau penduduk. Namun belum semua penduduk memberikan data golongan darah. Sehingga tatkala layanan administrasi kependudukan guna mengisi data pada biodata penduduk pada kartu keluarga dan

kartu tanda penduduk, banyak yang masih “tidak tahu” alias kosong.

Tabel dibawah ini data penduduk per golongan darah.

Gambar 4.5. Data Penduduk Menurut Golongan Darah



Sumber Data : DKB SMT I 2026 Dinas Dukcapil Kab. Paser

Penyajian data penduduk berdasarkan golongan darah adalah hal penting bagi *stake holder* terkait data golongan darah penduduk. Sehingga mempermudah lembaga/instansi baik pemerintah maupun swasta yang berwenang seperti PMI, RS, Puskesmas, Klinik/Rumah Bersalin, dan sebagainya dalam hal penyediaan darah. Ketersediaan darah dapat memberikan rasa tenang bagi pemerlunya. Data penduduk per golongan darah dapat digunakan untuk bahan perencanaan program dan kegiatan seperti kegiatan sosialisasi, penyuluhan hingga gerakan donor darah.

BAB V
KUALITAS PENDUDUK

Kualitas penduduk adalah tingkat kemampuan dan mutu kehidupan suatu populasi dalam aspek fisik dan nonfisik termasuk kesehatan, pendidikan, dan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Dunia internasional memandang kualitas pembangunan manusia diukur dengan Indikator Pembangunan Manusia (IPM). Melansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Paser tentang indikator-indikator IPM dengan menggunakan metode perhitungan baru meliputi indikator angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, dan angka paritas daya beli (kemampuan daya beli) masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Paser pada tahun 2025 tercatat sebesar **75,85**, mengalami peningkatan dari tahun 2024 yang berada di angka **75,13**.

Selanjutnya Analisis Isu Strategis diantaranya terkait IPM yang kini masih berada di posisi ke 7 dengan nilai IPM 75,85. Sementara itu, isu strategis terkait pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Paser masih bergantung pada sektor pertambangan. Kemudian tentang tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari tahun 2025 dengan angka 8,13 persen dan di 2024 9,73 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2025 tercatat mencapai 75,90, meningkat 0,88 poin (1,17%) dibandingkan 2024 yang sebesar 75,02. Capaian ini masuk kategori "tinggi", didorong oleh perbaikan di seluruh dimensi, yakni umur harapan hidup (74,47 tahun), pendidikan (HLS 13,30 tahun, RLS 9,07 tahun), dan pengeluaran per kapita (Rp12,80 juta).

A. Anak dan Perempuan

Keberadaan anak dan perempuan adalah merupakan kekayaan yang tiada banding sebagai objek sekaligus penunjang pembangunan. Keadaan anak di bawah usia lima tahun (0-4 tahun)

dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-49 tahun) se-kabupaten patut ditampilkan untuk mengetahui jumlah. Hal ini sebagai bahan perencanaan kegiatan bidang kesehatan anak dan perempuan. Dimana anak dan perempuan usia produktif apabila kegiatannya tidak tepat sasaran maka akan menimbulkan ketidakberhasilan menyokong IPM. Dan bisa digunakan untuk melihat jumlah kelahiran yang terjadi tahun yang lalu. Dimana anak 0-4 tahun laki-laki 11.556 dan perempuan 10.601 total 22.157 jiwa (6,97%) dari total jumlah penduduk 317.462 jiwa. Sementara perempuan usia produktif rentang usia 20-49 tahun berjumlah 72.210 jiwa atau 22,74% dari total penduduk keseluruhan.

Menjadi sebuah modal besar bagi sebuah kemajuan peradaban tatkala mendapatkan tempat layak sesuai kebutuhannya. Anak merupakan kelanjutan generasi bangsa yang harus disediakan sarana prasarana untuk mengembangkan potensi sumber yang dimiliki. Sementara itu perempuan atau ibu ada istilah *Al-Ummu madrasatul ula* yang berarti ibu adalah sekolah (madrasah) pertama. Baik perempuan baik pendidikan menuju generasi emas 2045.

B. Keekonomian

Pembahasan ini memiliki maksud untuk melihat kondisi penduduk dengan ragam jenis pekerjaan. Penduduk dengan berbagai latar belakang, kompetensi, kapasitas dan kapabilitasnya tentu mempengaruhi jenis pekerjaan yang digelutinya. Dari berbagai jenis pekerjaan tentu ada hubungannya dengan pendapatan. Baik pendapatan yang bersifat harian, mingguan mapun bulanan. Dibawah ini menampilkan tabel-tabel tentang sebaran penduduk menurut pekerjaan dengan ulasan-ulasan sederhana dengan tujuan memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemangku kepentingan terkait dengan data dimaksud. Data dimaksud telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak baik instansi/lembaga vertikal maupun horisontal melalui perjanjian kerja sama (PKS). Terutama pihak perbankan,

kepolisian, BPJS ketenagakerjaan & kesehatan, dan sebagainya. Kebutuhan data dimaksud masih terbatas pada lingkup tertentu.

Tabel 5.1. Data Penduduk Sebagai ASN/PNS, TNI & POLRI

No	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH			%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	ASN	2.444	2.230	4.674	1,47
2	TNI	182	1	183	0,06
3	POLRI	706	33	739	0,23
.	JUMLAH	3.332	2.264	5.596	1,76

Sumber Data : DKB SMT I 2026 Dinas Dukcapil Kab. Paser

Pada tabel 10 diatas ini memuat data penduduk dengan 3 (tiga) jenis pekerjaan sebagai aparatur pemerintah. Datanya menunjukkan bahwa hanya sekitar 1,76% saja dari jumlah penduduk Kabupaten Paser yang berjumlah 317.462 jiwa. Untuk menjawab tantangan jaman dibutuhkan profesionalisme aparatur yang didukung dengan perbandingan jumlah personil dalam melakukan pelayanan kepada penduduknya. Kebutuhan akan program pertanian (tanaman pangan), perkebunan (karet, sawit, kopi, dll) perikanan (laut dan darat) diperlukan tenaga teknis yang ahli dibidangnya.

Tabel 5.2. Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan (Pertanian dll)

NO	JENIS PEKERJAAN	PENDUDUK (JIWA)			%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	Petani/Pekebun	21.722	2.424	24.146	7,61
2	Peternak	25	3	28	0,01
3	Nelayan/Perikanan	5.057	29	5.086	1,60
4	Buruh Tani/Perkebunan	1.192	141	1.333	0,42
5	Buruh Nelayan/Perikanan	113	3	116	0,04
6	Buruh Peternakan	7	0	7	0,00
	TOTAL	28.116	2.600	30.716	9,68

Sumber Data : DKB SMT I 2026 Dinas Dukcapil Kab. Paser

Sedangkan tabel 5.2. diatas menunjukkan bahwa yang berprofesi sebagai petani hingga buruh peternakan hanya berkisar 9,68% dari jumlah penduduk 317.462 jiwa. Keadaan ini sangat perlu untuk dikembangkan lebih baik dari sisi pertanian, perkebunan

bahkan peternakan. Sebagaimana diungkapkan diatas tadi pengembangan program dan kegiatan dimana sektor tertentu perlu didukung tenaga ahli dibidangnya adalah bertujuan untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi yang ada baik petani (pemilik lahan) maupun buruh (pekerja) dan seterusnya.

C. Tenaga Medis dan Non Medis

Dunia kesehatan sangat penting dalam kehidupan manusia yang ditopang oleh orang-orang yang memiliki keahlian dibidangnya masing-masing. Pelayanan medis dan non medis yang memadai tentu sangat diperlukan untuk mendukung kehidupan penduduk baik sosial, ekonomi dan lainnya. Tercukupi secara materi akan menunjang kesejahteraan, kebahagiaan, dan ketenteraman. Terpenuhinya masyarakat akan kebutuhan sandang, papan, dan pangan sebagai kebutuhan pokok tentu menjadi cita-cita penduduk secara keseluruhan. Tapi hal saja tentu tidak cukup, masih diperlukan layanan kesehatan, layanan sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Dan juga tersedia ruang untuk mengaktualisasikan diri guna pengembangan potensi masyarakat selanjutnya.

Dibawah ini data penduduk dengan keahlian khusus bidang kesehatan yang sangat membantu mewujudkan tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Kehadirannya sangat penting untuk melaksanakan pelayanan sesuai keahliannya, agar masyarakat merasa nyaman, sehat dan aman dalam melakukan aktifitasnya. Keahlianya merupakan sebuah kekuatan yang nyata dalam pelayanan kesehatan, karena tidak bisa “asal” memberikan layanan sebab akan berakibat fatal. Pelayanan tersbut dapat diintegrasikan dengan layanan lain yang sejenis sehingga mampu menjangkau hingga pelosok desa dimana masih banyak lokasi yang terisolir. Istilah lain Daerah 3 T, Terpencil, Terisolir dan Tertinggal. Yang berakibat pemenuhan kebutuhan kesehatan menjadi sulit.

Tabel 5.3. Data Penduduk dengan Keahlian Khusus

No	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Dokter	151	0,05
2	Bidan	318	0,10
3	Perawat	362	0,11
4	Apoteker	62	0,02
.	JUMLAH	893	0,28

Sumber Data : DKB SMT I 2026 Dinas Dukcapil Kab. Paser

Apabila mencermati tabel 5.3. ini di Kabupaten Paser masih banyak memerlukan tenaga medis/paramedik. Karena apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk kondisi di tabel menandakan kekurangan jumlah tenaga kesehatan apalagi dengan cakupan luas wilayah yang ada. Hal demikian akan terasa apabila ada gejala-gejala penyakit yang bersifat pandemi seperi 2020 hingga awal 2022. Dalam kondisi tertentu dipastikan sangat memerlukan tenaga medis yang banyak dan siap pakai.

D. Cakupan Layanan Kependudukan

Kepemilikan akta kelahiran merupakan bagian awal dokumen yang harus dimiliki oleh setiap penduduk. Mengingat peristiwa penting kependudukan yang pertama dilalui adalah kelahiran. Gerakan Indonesia Sadar Adminitrasi Kependudukan (GISA) mendorong setiap penduduk yang melewati kejadian atau peristiwa penting tersebut dapat bersegera menuju layanan penerbitan aktanya sehingga saat itu kelahiran hari itu juga mendapatkan akta kelahiran. Setelah akta kelahiran, layanan selanjutnya adalah kartu keluarga dan kartu identitas anak bagi anak yang lahir.

Pada tabel 5.4 dibawah ini secara umum mendeskripsikan tentang kepemilikan akta kelahiran dari seluruh penduduk laki-laki dan perempuan. Dari jumlah penduduk 315.033 telah memiliki akta kelahiran sebanyak 171.408 jiwa dan yang belum memiliki sebanyak 125.174. Sebagaimana tersaji pada tabel-tabel dibawah ini yang dapat

dimuat berdasarkan hasil unduh data dari database kependudukan pada aplikasi SIAK terpusat.

Tabel 5.4. Cakupan Layanan Kepemilikan Akta Kelahiran

No.	WILAYAH	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSENTASE
1	BATU SOPANG	19.275	11.542	62,55
2	TANJUNG HARAPAN	6.760	4.186	61,76
3	PASER BELENGKONG	20.363	11.935	63,05
4	TANAH GROGOT	53.929	34.912	60,7
5	KUARO	21.001	11.571	64,48
6	LONG IKIS	30.548	14.445	67,9
7	MUARA KOMAM	8.876	5.882	60,14
8	LONG KALI	19.750	9.693	67,08
9	BATU ENGAU	12.937	9.186	58,48
10	MUARA SAMU	5.173	3.069	62,76
	TOTAL	**198.612**	**116.421**	**63,04**

Sumber Data : DKB SMT I 2026 Dinas Dukcapil Kab. Paser

Pencapaian seluruh penduduk Kabupaten Paser yang telah memiliki/belum memiliki Akta Kelahiran. Selanjutnya dibawah ini ada tabel yang memuat data kepemilikan akta kelahiran anak berumur 0-5 tahun. Dengan penyajian data seperti ini dapat dinyatakan bahwa dari jumlah penduduk usia 0-5 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran sebanyak 27.790 jiwa, artinya 99,11 % bayi dan balita di Paser telah ber akta kelahiran. Menyisakan 0,89 % yang belum memiliki akta kelahiran. Keadaan ini tentu menjdi perhatian khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dalam menyusun rencana program baik 5 tahunan (RENSTRA) maupun rencana program tahunan yang di-*breakdown*-per semester, per triwulan, per bulan hingga per minggu. Bertujuan secara target kinerja terpenuhi dan layanan yang menjangkau hingga masyarakat terpenuhi secara proporsional.

Keberadaan data ini sangat diperlukan bagi dinas instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan

Perempuan & Anak, Dinas Kesehatan sebagai sasaran kinerja, dan bagi organisasi baik pemerintah maupun swasta yang konsen dengan tumbuh kembang anak.

Table 5.5. Penduduk Usia 0-5 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran

No.	WILAYAH	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSENTASE
1	BATU SOPANG	3.185	24	99,25
2	TANJUNG HARAPAN	999	50	95,23
3	PASER BELENGKONG	2.884	9	99,69
4	TANAH GROGOT	8.108	44	99,46
5	KUARO	2.825	9	99,68
6	LONG IKIS	3.593	20	99,45
7	MUARA KOMAM	1.168	31	97,41
8	LONG KALI	2.398	29	98,81
9	BATU ENGAU	1.965	26	98,69
10	MUARA SAMU	665	8	98,81
	TOTAL	**27.790**	**250**	99,11

Sumber Data : DKB SMT I 2026 Dinas Dukcapil Kab. Paser

Selanjutnya akan menampilkan kepemilikan akta kelahiran anak usia 5-18 tahun, dimana pada usia ini anak-anak memasuki masa pendidikan dasar hingga menengah.

Tabel 5.6. Penduduk Usia 5-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran

No.	WILAYAH	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSENTASE
1	BATU SOPANG	10.984	153	98,63
2	TANJUNG HARAPAN	3.547	165	95,55
3	PASER BELENGKONG	10.509	124	98,83
4	TANAH GROGOT	29.864	382	98,74
5	KUARO	10.702	87	99,19
6	LONG IKIS	14.311	182	98,74
7	MUARA KOMAM	4.713	87	98,19
8	LONG KALI	9.631	178	98,19
9	BATU ENGAU	7.220	216	97,10
10	MUARA SAMU	2.732	118	95,86

TOTAL	104.213	1.692	98,40

Sumber Data : DKB SMT I 2026 Dinas Dukcapil Kab. Paser

Membicarakan tabel 5.6. diatas jelas membeberkan data tentang kepemilikan akta kelahiran penduduk yang berusia 5-18 tahun. Dari data diatas menjelaskan bahwa jumlah penduduk pada usia tersebut yang memiliki akta kelahiran sebanyak 104.213 jiwa dari jumlah penduduk yang berusia 5-18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran sudah mencapai 98.40%. Dengan memiliki akta sejak dini maka data yang ada pada lembaga pendidikan mesti sama dengan dokumen kependudukan.

Dengan demikian terkait kepemilikan akta kelahiran sesuai dengan database kependudukan hasil data konsolidasi atau data kependudukan bersih (DKB) Semester I Tahun 2026, pencapaian untuk anak usia 0-5 tahun dan 5-18 tahun sudah diatas rata-rata nasional. Sementara untuk keseluruhan penduduk ini yang masih perlu di-*push* agar kepemilikan aktanya semakin meningkat. Maka pelayanan langsung dimaksimalkan melalui inovasi layanan hingga tingkat desa/kelurahan dan kegiatan jemput bola, disamping pelayanan regular di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Serta memanfaatkan momen-momen tertentu untuk menjangkau keberadaan penduduk dipelosok desa. Sebagaimana diketahui bahwa dalam melakukan kunjungan layanan ke desa masih terkendala sarana dan prasarana. Mengingat pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan saat ini.

BAB VI
MIGRASI PENDUDUK

A. Migrasi

Mobilitas Penduduk Permanen (Migrasi) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrasi (Migrasi Internal) atau batas politik/negara (Migrasi International) atau dengan cara lain migrasi diartikan perpindahan permanen dari suatu daerah ke daerah lain, yang terjadi karena adanya perbedaan kondisi kedua daerah tersebut. Perbedaan terbesar yang mendorong terjadinya migrasi adalah kondisi ekonomi dan non ekonomi. Migrasi juga dipengaruhi oleh daya dorong suatu daerah dan daya tarik daerah lainnya. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke daerah lain, seperti perkembangan industri, perdagangan, pendidikan, perumahan, dan transportasi. dengan kata lain suatu daerah mempunyai daya tarik jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber penghidupan penduduk, baik bagi penduduk wilayah itu sendiri maupun penduduk disekitarnya dan daerah-daerah lain. Kondisi ini diminati oleh penduduk daerah lain yang berharap dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya untuk memberikan jaminan kehidupan.

Pada sisi lain, setiap daerah mempunyai faktor pendorong yang dapat menyebabkan sejumlah penduduknya migrasi keluar daerah. Faktor pendorong itu antara lain kesempatan kerja yang terbatas jumlah dan jenisnya, sarana dan prasarana pendidikan kurang memadai, fasilitas perumahan dan kondisi lingkungan kurang baik.

Adapun beberapa faktor non ekonomis yang mempengaruhi keinginan seseorang melakukan migrasi adalah:

1. Faktor-faktor sosial, termasuk keinginan para migran untuk melepaskan dari kendala-kendala tradisional yang terkandung

dalam organisasi-organisasi sosial yang sebelumnya mengekang mereka untuk mengembangkan diri secara menyeluruh.

2. Faktor-faktor fisik, termasuk pengaruh iklim dan bencana meteorologis, seperti banjir dan kekeringan.
3. Faktor-faktor demografi, termasuk penurunan tingkat kematian yang kemudian mempercepat laju pertumbuhan penduduk suatu tempat.
4. Faktor-faktor kultural, termasuk pembinaan kelestarian hubungan keluarga besar yang berada pada tempat tujuan migrasi.
5. Faktor-faktor komunikasi, termasuk kualitas seluruh sarana transportasi, sistem pendidikan yang cenderung berorientasi pada kehidupan kota dan dampak-dampak modernisasi yang ditimbulkan oleh media massa atau media elektronik.

Yang menjadi tujuan Perpindahan Penduduk keluar dari suatu daerah atau yang disebut Migrasi Keluar adalah kota-kota indurtri/niaga seperti Balikpapan, Samarinda dan lainnya. Karena kota niaga dianggap dapat menyediakan lapangan pekerjaan baik sektor formal maupun non formal dengan lebih banyak dan beragam. Perpindahan penduduk ke dalam dari suatu daerah atau Migrasi Masuk ke Kabupaten Paser umumnya dikarenakan faktor non ekonomis diantaranya keluarga besar berada di tempat tujuan migrasi, dan pernikahan.

Untuk faktor ekonomis sangat kecil sekali migrasi masuk ke Kabupaten Paser karena Kabupaten Paser bukan merupakan daerah perdagangan dan industri. Paser adalah kawasan perkebunan dan pertanian. Kalaupun ada kehidupan keekonomian lain adalah pertambangan yang tentu memiliki keterbatasan. Hal ini harus memacu dan memicu secara bersama antara masyarakat dan pemerintah, sehingga iklim usaha ekonomi produktif dengan potensi sumber lokal menjadi komoditas pengganti yang lebih baik dimasa mendatang.

Berbagai dampak yang timbul baik dari sisi positif dan negatif dari Migrasi dapat dikelompok-kelompokkan sebagai berikut :

1. Dampak Positif Migrasi
    a. Meningkatnya taraf hidup masyarakat secara luas.
    b. Mampu memenuhi kekurangan tenaga kerja di daerah tujuan.
    c. Mengurangi pengangguran bagi daerah yang padat penduduknya.
    d. Meningkatkan produksi pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan sebagainya. Seperti perluasan sawah, empang atau tambak, budidaya ikan air tawar, optimalisasi perkebunan kelapa sawit, karet, ternak sapi, ternak kambing dan lain-lain. Sekaligus perluasan pemasaran hasil-hasil tersebut.
    e. Dapat mempercepat pemerataan persebaran penduduk dengan perluasan dan pemerataan kesempatan dan peluang kerja.

    Apabila diungkap lebih lanjut masih hal positif atau kebaikan lainnya baik secara pribadi maupun sosial.
2. Dampak Negatif Migrasi
    a. Berkurangnya tenaga terampil dan terdidik di daerah asal.
    b. Produktivitas pertanian di desa menurun karena tenaga kerja berkurang.
    c. Meningkatnya tindak kriminalitas yang diakibatkan oleh berbagai masalah.
    d. Meningkatnya pengangguran di kota akibat kesempatan kerja kurang.
    e. Timbulnya pemukiman kumuh akibat sulitnya mencari perumahan dan penataan wilayah yang belum siap. Lalu lintas daerah tertentu menjadi padat, sehingga sering menimbulkan kemacetan lalu lintas dan permasalahan lainnya.

B. Pindah dan Datang

Pada proses migrasi terdapat 2 (dua) hal yang bersinggungan yaitu *pinda*h dan *datang*. Pindah dipahami bersama sebagai mobilitas penduduk untuk migrasi keluar dari domisili atau tinggalnya saat ini. Sedangkan datang adalah pelaporan kedatangan dari daerah asal ke daerah tujuan. Alasan seseorang atau dalam 1 (satu) keluarga didasari alasan perumahan, pekerjaan, pendidikan dan sebagainya. Sementara untuk migrasi datang juga dengan alasan sama. Hal ini tidak serta merta menjadi hal yang mustahil karena merupakan “kebutuhan” penduduk yang harus dilayani sesuai kebutuhannya.

Proses mutasi penduduk terfasilitasi dengan baik pada Peraturan Presiden terbaru yakni Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Bahkan dengan majunya dunia layanan adminduk, sekarang proses pindah datang dapat diproses secara online, sebagaimana pengurusan dokumen kependudukan lainnya.

Tabel : 6.1. Data Migrasi Penduduk

No.	KECAMATAN	MIGRASI		JUMLAH
		MASUK	KELUAR	
1	JANUARI	463	405	868
2	FEBRUARI	553	352	905
3	MARET	375	338	713
4	APRIL	398	304	702
5	MEI	511	375	886
6	JUNI	592	517	1.109
JUMLAH		5.800	4.445	**10.245**

Sumber Data : DKB SMT I 2026 Dinas Dukcapil Kab. Paser

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyajian dalam bentuk Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Paser Semester I Tahun 2026 ini memberikan gambaran mengenai Data-data Rekapitulasi Kependudukan di Kabupaten Paser yang bersumber dari Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026. Dari gambaran tersebut dapat memberikan sejumlah rekomendasi untuk menyusun kebijakan daerah, penelitian, sebagai dasar bagi pendataan dan lainnya. Dengan demikian tujuan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Paser Semester I Tahun 2026 ini kami harapkan dapat digunakan sebagai acuan oleh lembaga pemerintah/swasta maupun pihak lain yang membutuhkan.

Buku ini juga untuk mengetahui lebih lanjut kondisi ke depan tentang kependudukan dan permasalahannya, maka buku profil perkembangan kependudukan Kabupaten Paser ini disajikan setiap tahun. Pada buku profil mendatang akan dilakukan berbagai upaya untuk menyajikan data yang lebih variasi dan *up to date*, antara lain dengan memperbaiki sistem penyajian data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.

Dengan semangat Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dan Digitalisasi Layanan Adminduk dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD) mampu membawa dampak positif bagi perkembangan kepemilikan dokumen kependudukan sekaligus validasi data kependudukan berjalan sebagaimana mestinya. Penyajian data yang valid dan akurat juga sangat tergantung pada karakter dan perilaku masyarakat sendiri, sehingga masyarakat diharapkan untuk selalu melaporkan peristiwa

kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai dasar perubahan pada dokumen kependudukannya.

B. Referensi

Buku Profil Kependudukan merupakan ikhtisar dari hasil pelayanan dalam pengolahan data kependudukan sekaligus sebagai sajian data dan informasi kependudukan. Melalui tatakelola secara baik, terintegrasi dan sesuai dengan hasil pelayanan dan pengolahan administrasi kependudukan. Penyajian data dalam bentuk buku ini diharapkan mampu menginspirasi bagi penyusun maupun referensi para *stake holder* agar pembangunan kependudukan ke depan semakin maju dan mampu memenuhi dan melayani kebutuhan penduduk secara luas. Sekali lagi disampaikan bahwa data itu memang mahal akan tetapi lebih mahal jika membangun tanpa data.

Kami menyadari bahwa buku Profil Kependudukan Kabupaten Paser Semester I Tahun 2026 ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran sangat kami butuhkan untuk perbaikan profil kependudukan mendatang, baik dari pengguna data maupun pemerhati masalah kependudukan, sangat kami harapkan.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER

JL. KUSUMA BANGSA KM.5 KOMPLEK PERKANTORAN GEDUNG D LANTAI I DAN II KAVLING II

Website
https://disdukcapil.paserkab.go.id

Facebook
Disdukcapil Paser

Instagram
dukcapilpaser_

Email
disdukcapilpaser0@gmail.com

DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KABUPATEN PASER